

2025



LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

**DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN KALURAHAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah.

Akuntabilitas kinerja merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang baik untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil bisa optimal serta cara-cara yang digunakan untuk mencapainya.

Akuntabilitas dalam bentuk laporan dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi karena pencapaian suatu tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi yang akan terlihat jelas pada pencapaian sasaran.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Wonosari, 30 Januari 2026
KEPALA,

Drs. SUJARWO, M.Si.
NIP.196604251991021001



RINGKASAN EKSEKUTIF

Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian Tujuan 1 “Terwujudnya tata kelola pemerintahan kalurahan yang baik”

Diukur dengan 2 (dua) indikator, yaitu

a. Indikator Persentase kalurahan yang melaporkan LPPKal tepat waktu tahun 2026”

Realisasi kinerja tahun 2025 mencapai 95,14% dari target 100%. Capaian tersebut telah sesuai dengan tahapan pencapaian target Renstra, karena target 100% ditetapkan sebagai target akhir Renstra pada tahun 2026.

b. Indikator Persentase Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM)

Realisasi tahun 2025 sebesar 97,22% dengan target 87,5%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 111,11% dari target yang ditetapkan.

2. Capaian Tujuan 2 “Terwujudnya pengendalian angka kelahiran”

Kinerja sasaran yang diukur dengan indikator Total Fertility Rate (TFR) pada tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar 1,90 dari target 1,91, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 99,48%

3. Capaian Sasaran Strategis 1 “Akuntabilitas pemerintahan kalurahan dan pemberdayaan masyarakat meningkat”:

a. Diukur dengan 2 (dua) indikator:

- 1) Persentase kalurahan yang melaporkan LPPKal (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan) tepat waktu.



- 2) Persentase desa mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM)
- b. Capaian indikator sasaran tahun 2025:
 - 1) Persentase kalurahan yang melaporkan LPPKal (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan) tepat waktu sebesar 95,14%. Dibandingkan dengan target sebesar 95%, capaian kinerja telah melampaui target, dengan tingkat capaian sebesar 100,15%
 - 2) Persentase desa mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) sebesar 97,22%. Dibandingkan dengan target sebesar 87,5%, capaian kinerja telah melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 111,11%.
- c. Dibandingkan dengan capaian tahun 2024, yaitu sebesar 90,27% untuk indikator Persentase kalurahan yang melaporkan LPPKal tepat waktu dan 87,5% untuk indikator Persentase desa mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM), pada tahun 2025 terjadi peningkatan capaian masing-masing sebesar 4,87% dan 9,72%.
4. Capaian sasaran strategis 2 “Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Meningkat”:
 - a. Sasaran Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Meningkat diukur dengan indikator Nilai AKIP PD.
 - b. Target capaian Nilai AKIP PD pada tahun 2025 sebesar 83,5 dengan realisasi sebesar 83,93. Persentase realisasi terhadap target mencapai 100,51%. Dengan demikian, kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah melampaui target.
5. Capaian sasaran strategis 3 “PUS yang menjadi peserta KB aktif meningkat”:
 - a. Sasaran PUS yang menjadi peserta KB aktif meningkat diukur dengan indikator persentase pemakaian alat kontrasepsi modern



- b. Target capaian indikator sasaran pada tahun 2025 sebesar 78,16%, dengan realisasi tahun 2025 sebesar 64,63%. Persentase realisasi terhadap target mencapai 82,69%. Dengan demikian, kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul belum mencapai target.
- c. Dibandingkan dengan capaian tahun 2024 sebesar 70,39%, pada tahun 2025 terjadi penurunan capaian sebesar 5,76%.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul ke depan, antara lain sebagai berikut:

1. Keterbatasan pagu anggaran sehingga fasilitasi dan pendampingan kurang optimal;
2. Tingkat kesadaran masyarakat penggunaan MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) masih rendah;
3. Kurangnya petugas Lini Lapangan /PKB (Penyuluh Keluarga Berencana) yang tidak sebanding dengan jumlah kalurahan yang diampu;
4. Banyaknya pernikahan di bawah usia 20 tahun;
5. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah;
6. Minimnya SDM sehingga terjadi kekosongan personil di beberapa jabatan.



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
KATA PENGANTAR.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I _ PENDAHULUAN	1
I. Latar Belakang	1
II. Cascading Kinerja Sebagai Dasar Pembentukan Perangkat Daerah ...	2
III. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi	3
IV. Tugas dan Fungsi	5
V. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>)	7
VI. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran	8
BAB II _ PERENCANAAN KINERJA	11
I. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah.....	11
II. Strategi dan Arah Kebijakan	14
III. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025	15
IV. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	21
V. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
I. Capaian Kinerja Tahun 2025	26
II. Capaian Kinerja Lainnya	49
III. Efisiensi Anggaran	55
BAB IV _ PENUTUP	688
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi	8
Tabel I.2	Sarana-Prasarana	9
Tabel I.3	Anggaran Tahun 2025.....	10
Tabel II.1	Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul, 2021-2026.....	12
Tabel II.2	Strategi dan Arah Kebijakan.....	14
Tabel II.3.1.	Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025	15
Tabel II.3.2.	Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2025	20
Tabel II.4.1	Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025.....	22
Tabel II.4.2	Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025.....	23
Tabel III.1.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	26
Tabel III.1.2	Capaian Kinerja Tahun 2025	27
Tabel III.1.3	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	28
Tabel III.1.4	Capaian Sasaran Akuntabilitas Pemerintahan Kalurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Meningkatkan	29
Tabel III.1.5	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023-2025 serta perbandingan dengan target akhir Renstra di tahun 2026..	30
Tabel III.1.6	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	31
Tabel III.1.7	Capaian Kinerja Program pada Sasaran Akuntabilitas Pemerintahan Kalurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Meningkatkan	31
Tabel III.1.8	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	36
Tabel III.1.9	Capaian Sasaran Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Meningkatkan.....	37
Tabel III.1.10	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023-2025 serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di tahun 2026	39
Tabel III.1.11	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	39



Tabel III.1.12 Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	39
Tabel III.1.13 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	43
Tabel III.1.14 Capaian Sasaran PUS yang menjadi peserta KB aktif meningkat	43
Tabel III.1.15 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023-2025 serta Perbandingandengan Target Akhir Renstra di Tahun 2025	44
Tabel III.1.16 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	45
Tabel III.1.17 Capaian Kinerja Program pada Sasaran PUS yang menjadi peserta KB aktif meningkat.....	45
Tabel III.2 Capaian SDG's Tahun 2025.....	49
Tabel III.3.1 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan.....	57
Tabel III.3.2Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025.....	67



DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1. Cascading Kinerja	3
Gambar I.2. Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunugkidul	5
Gambar II.1. Sistem Integrasi ROPK, Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP	25
Gambar II.2. Sistem Evaluasi RKPD SIPANDA	25
Gambar III.1 Foto-Foto Kegiatan yang Relevan dengan Capaian Sasaran Akuntabilitas Pemerintahan Kalurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Meningkatkan	33
Gambar III.2 Foto-Foto Kegiatan yang Relevan dengan Capaian Sasaran Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Meningkatkan	41
Gambar III.3 Foto-Foto Kegiatan yang Relevan dengan Capaian Sasaran PUS yang menjadi peserta KB aktif meningkatkan	47
Gambar III.4. Sarana dan Prasarana bagi Kelompok Rentan	52
Gambar III.5. Kegiatan Berperspektif Gender.....	54



BAB I berisi:

1. Latar Belakang
2. Cascading Kinerja Sebagai Dasar Pembentukan Perangkat Daerah
3. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi
4. Tugas dan Fungsi
5. Permasalahan Utama (Strategic Issued)
6. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Setiap Perangkat Daerah wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.



Tujuan penyusunan LKjIP adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

LKjIP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya *good governance* serta berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

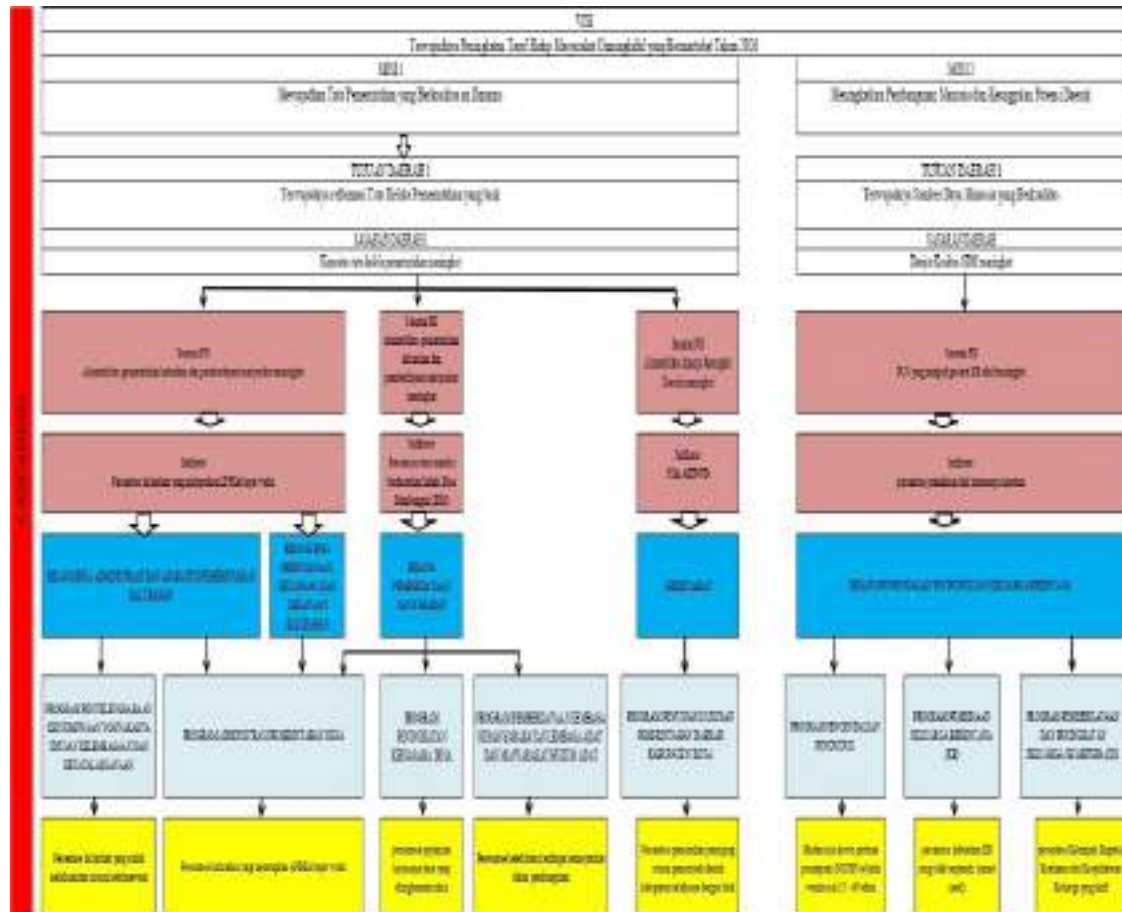
Bertitik tolak dari Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 dan Rencana Kinerja Tahunan 2025, maka LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul yang disusun merupakan realisasi hasil kegiatan tahun 2025 dan menyajikan laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan.

.II. Cascading Kinerja Sebagai Dasar Pembentukan Perangkat Daerah

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (Performance Based Organization) yang diterapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2021 – 2026. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan,



Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

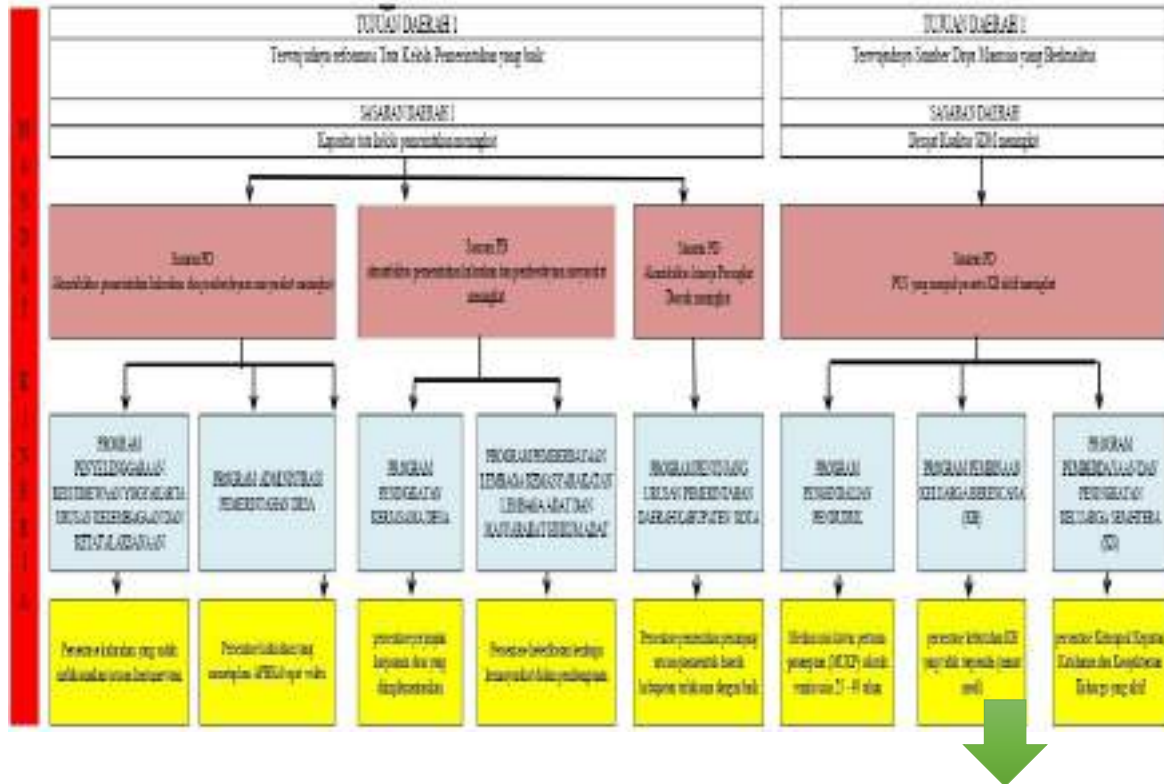


Gambar I.1. Cascading Kinerja

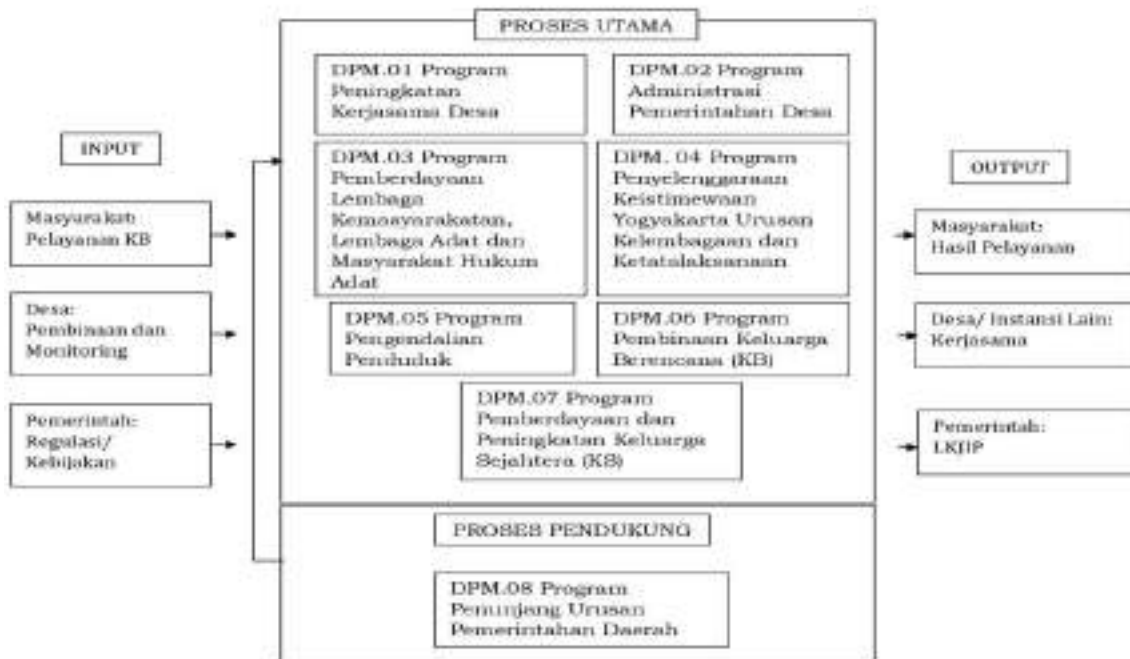
.III. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

Hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

**LAPORAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**



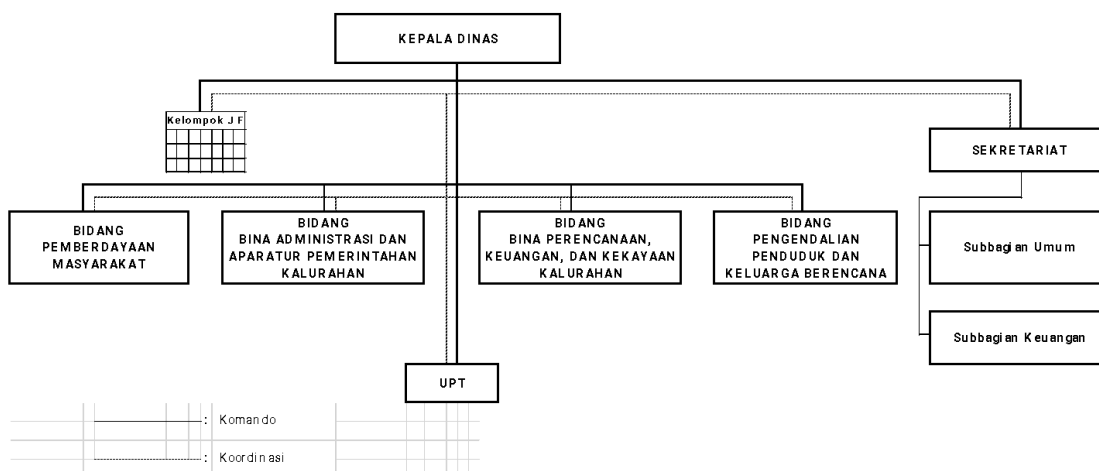
PROSES PETA BISNIS DPMKP2KB



**LAPORAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**



P. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



**Gambar I.2. Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul**

.IV. Tugas dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2025. Sedangkan tugas pokok dan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan,



Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan umum di bidang di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Kalurahan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
2. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Kalurahan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
3. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Kalurahan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
4. pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan partisipasi, komunikasi, informasi, dan edukasi keluarga berencana;
5. pelaksanaan pembinaan kelembagaan, partisipasi, sarana, dan prasarana serta usaha ekonomi desa dan masyarakat;
6. pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah Kalurahan;
7. pelaksanaan pembinaan perencanaan, keuangan, dan kekayaan Kalurahan;
8. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Dinas;
9. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Kalurahan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
10. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Kalurahan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
11. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Kalurahan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
12. pengelolaan kesekretariatan Dinas; dan
13. pengelolaan UPT (Unit Pelaksana Teknis).



.V. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Diuraikan secara ringkas permasalahan utama yang sedang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Kesekretariatan
 - a. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah
 - b. Minimnya SDM (Sumber Daya Manusia) sehingga terjadi kekosongan personil di beberapa jabatan
2. Bidang Pengendalian Penduduk dan KB
 - a. Kecenderungan meningkatnya angka pertumbuhan penduduk
 - b. Tingginya unmet need KB
 - c. Banyaknya pernikahan di bawah usia 20 tahun
 - d. Jumlah penyuluh KB belum memenuhi rasio ideal
 - e. Rendahnya partisipasi laki-laki ber-KB
 - f. Partisipasi KB dengan metode kontrasepsi jangka panjang relative sedikit
3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Belum optimalnya partisipasi lembaga masyarakat dan lembaga ekonomi pedesaan dalam pembangunan.
 - b. Belum optimalnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan
 - c. Pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan (20% dari dana desa) belum optimal
 - d. Sinkronisasi kebijakan dan pelaksanaan teknis antara pusat, daerah dan kalurahan terkait Koperasi Desa Merah Putih belum optimal
4. Bidang Bina Administrasi dan Aparatur Pemerintahan Kalurahan
 - a. Belum optimalnya pelayanan administrasi kalurahan
 - b. Masih rendahnya kapasitas dan kompetensi aparatur kalurahan
 - c. Kekayaan kalurahan belum dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan asli kalurahan
5. Bidang Bina Perencanaan, Keuangan, dan Kekayaan Kalurahan
 - a. Belum optimalnya pengelolaan keuangan kalurahan
 - b. Belum optimalnya pengelolaan kekayaan aset kalurahan



- c. Masih terdapat permasalahan dalam pengisian lurah dan pamong kalurahan
- d. Masih terdapat pelanggaran disiplin aparatur pemerintah kalurahan

.VI. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi					Pegawai yang ada					Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi				JMI	Kualifikasi				Laki	Peremp
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1					1	1				1	
							0						
B.	Jabatan Administrasi						0						
	Administrator	1					1	1				1	
	Pengawas	6					6	3	3			5	1
	Pelaksana	50		18	23	9	18		7	3	8	9	9
C.	Jabatan Fungsional	49	10	25	10	4	4	1	3			3	1
	Jumlah	107	10	43	33	13	30	6	13	3	8	19	11

Sumber: Data Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Desember 2025

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 13 orang (43,33%), disusul oleh jenjang pendidikan SMA sebanyak 8 orang (26,67%), S2 6 orang (20%), D3 3 orang (10%). Komposisi pegawai perempuan lebih sedikit dibanding pegawai laki-laki, namun dalam pelaksanaan tugas, ada 1 pegawai perempuan yang



menduduki jabatan struktural, hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 77 orang, terdiri dari 32 pelaksana dan 45 pejabat fungsional. Terdapat satu unit kerja setara eselon IV yakni Kelompok Substansi Perencanaan yang menangani 7 (tujuh) sub kegiatan tetapi hanya didukung 1 (dua) orang PPPK Pengadministrasi Perkantoran. Hal ini tentu berpengaruh pada optimalisasi tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul sebagai pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana.

Dukungan sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.2 Sarana-Prasarana

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)*
1	Aset Tetap		
2	Tanah	3	2.835.000
3	Peralatan Dan Mesin	2142	7.544.219.017,6
4	Gedung Dan Bangunan	29	10.235.611.786
5	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	5	147.631.000
6	Aset Lainnya		
7		13	39.750.000
	<i>Jumlah</i>		<i>17.970.046.803,6</i>

Sumber: Data Aset 31 Desember 2025

Kendaraan dinas terdiri dari yakni 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan, 5 (empat) unit kendaraan operasional, 1 (dua) unit kendaraan khusus dan 104 (seratus empat) unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang gudang alat kontrasepsi, ruang gudang, ruang tunggu, dan toilet.

Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personal computer/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 1:1. Namun personal computer/ laptop tersebut juga

**LAPORAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**



tersebar di balai penyuluh KB, dan beberapa kondisinya tidak bisa dipakai. Dengan demikian ketersediaan computer/ laptop belum memadai.

Tabel I.3 Anggaran Tahun 2025

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
5	BELANJA DAERAH	Rp15.685.577.777	Rp15.653.007.853	(Rp32.569.924)
5 1	BELANJA OPERASI	Rp15.595.499.777	Rp15.550.295.853	(Rp45.203.924)
5 1 01	Belanja Pegawai	Rp2.171.967.932	Rp2.196.896.708	Rp24.928.776
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	Rp13.423.531.845	Rp13.353.399.145	(Rp70.132.700)
5 1 05	Belanja Hibah	0	0	0
5 2	BELANJA MODAL	Rp90.078.000	Rp102.712.000	Rp12.634.000
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp90.078.000	Rp102.712.000	Rp12.634.000
	Jumlah Belanja	Rp15.685.577.777	Rp15.653.007.853	(Rp32.569.924)
	Total Surplus/(Defisit)	(Rp15.685.577.777)	(Rp15.653.007.853)	

Sumber data: *Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025*

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul berasal dari APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2025 Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul semula Rp15.685.577.777,00 dan mengalami perubahan menjadi Rp15.653.007.853,00 atau berkurang Rp32.569.924. Perubahan anggaran Tahun 2025 merupakan penyesuaian anggaran berdasarkan kebutuhan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul dalam bentuk pengurangan dan realokasi anggaran. Pengurangan dan realokasi anggaran dilakukan sebagai bentuk pemenuhan sosialisasi kepada Posyandu dan Perangkat Desa, serta penyesuaian gaji dan tunjangan ASN.



BAB II berisi:

1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah
2. Strategi dan Arah Kebijakan
3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja daerah dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai dokumen teknis operasional.

.I. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Sesuai *cascade* kinerja, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul mendukung pencapaian 2 (dua) sasaran Pemerintah Daerah, yaitu:

1. Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan yang didukung oleh Program Administrasi Pemerintahan Desa, Program Peningkatan Kerjasama Desa, Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;



2. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM yang didukung oleh Program Pengendalian Penduduk, Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), Serta Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul selama lima tahun ada 2 (dua) yaitu

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan kalurahan yang baik
2. Terwujudnya pengendalian angka kelahiran

Adapun tujuan dan sasaran dan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul dalam waktu 5 (lima) tahun sebagai berikut:

Tabel II.1 Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul, 2021-2026

NO.	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2021	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Renstra
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kalurahan yang baik	Persentase kalurahan yang melaporkan LPPKal tepat waktu tahun 2026	Persen	71					100	100
		Persentase desa mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2026	Persen	9.72					31.25	31.25
2..	akuntabilitas pemerintahan kalurahan dan pemberdayaan masyarakat meningkat	Persentase kalurahan yang melaporkan LPPKal tepat waktu	Persen	71	80	85	90	95	100	100

**LAPORAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**



NO.	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2021	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Renstra
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Persentase desa mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM)	Persen	9.72	17.36	20.83	24.31	27.78	31.25	31.25
3.	Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah meningkat	Nilai AKIP PD	Nilai	76.11	80.5	81.5	82.5	83.5	84.5	84.5
4.	Terwujudnya pengendalian angka kelahiran	Total Fertility Rate (TFR)	jiwa	1.96					1.91	1.91
5.	PUS yang menjadi peserta KB aktif meningkat	persentase pemakaian alat kontrasepsi modern	Persen	78.06	78.10	78.12	78.14	78.16	78.18	78.18

Berdasarkan rincian tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja sebagaimana tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa sebagian indikator kinerja tujuan juga digunakan sebagai indikator kinerja sasaran strategis guna menjaga keterkaitan dan kesinambungan antara tujuan dan sasaran. Indikator persentase kalurahan yang melaporkan LPPKal tepat waktu dan persentase desa mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) berfungsi sebagai indikator kinerja sasaran strategis sekaligus indikator keberhasilan pencapaian tujuan s selama periode Renstra 2021–2026. Dengan penggunaan indikator yang sama, pencapaian sasaran strategis secara langsung mencerminkan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.



.II. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	akuntabilitas pemerintahan kalurahan dan pemberdayaan masyarakat meningkat	Meningkatkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan dan pemberdayaan masyarakat	Meningkatkan kapasitas aparatur kalurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan dan kapasitas lembaga Masyarakat
2.	Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah meningkat	Peningkatan koordinasi penunjang urusan perangkat daerah	Mengarahkan dan mengkoordinasikan seluruh bidang bekerja sesuai SOP
3.	PUS yang menjadi peserta KB aktif meningkat	Peningkatan pengendalian penduduk dengan menurunkan laju pertumbuhan penduduk	Meningkatkan pengendalian penduduk melalui pembinaan sekolah siaga kependudukan pada lembaga formal, pembinaan kelompok remaja peduli kependudukan, pembinaan kampung KB dan rumah data kependudukan, pemetaan kependudukan, penyusunan kajian dampak kependudukan, serta penyedia data dan informasi keluarga
		Peningkatan pembinaan keluarga berencana dan peningkatan keluarga sejahtera	Meningkatkan pelaksanaan advokasi, KIE KKBPK, penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana pelayanan KB, pendayagunaan tenaga lini lapangan, pelayanan KB, pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi masyarakat, dan pembinaan kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga



.III. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.3.1. Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait
Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah meningkat	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	8,730,000	7,790,000	-940,000
	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	8,730,000	7,790,000	-940,000
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	8,730,000	7,790,000	-940,000
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	3,445,361,600	3,669,128,300	223,766,700
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	3,445,361,600	3,669,128,300	223,766,700
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	35,204,900	35,404,900	200,000
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	6,000,000	6,000,000	-
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	18,210,000	22,665,000	4,455,000
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	34,780,000	34,780,000	-
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	34,415,000	34,615,000	200,000
	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	1,500,000	1,500,000	-
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	35,750,000	22,930,100	-12,819,900
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	5,000,000	3,400,000	-1,600,000
	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2,993,565,600	3,238,237,200	244,671,600

**LAPORAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**



Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	7,260,000	7,260,000	-
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	64,225,000	64,425,000	200,000
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	26,716,000	13,916,000	-12,800,000
	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	2,000,100	2,000,100	-
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	180,735,000	181,995,000	1,260,000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	538,830,000	535,310,000	-3,520,000
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	538,830,000	535,310,000	-3,520,000
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT RW PKK Posyandu LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	75,990,000	81,670,000	5,680,000
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	39,495,000	37,495,000	-2,000,000
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	14,710,000	11,600,000	-3,110,000
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	278,880,000	274,790,000	-4,090,000
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	129,755,000	129,755,000	-

**LAPORAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**



Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	246,530,000	173,349,600	-73,180,400
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	246,530,000	173,349,600	-73,180,400
	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	246,530,000	173,349,600	-73,180,400
PUS yang menjadi peserta KB aktif meningkat	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	449,027,500	434,327,500	-14,700,000
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	1,200,000	1,200,000	-
	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	1,200,000	1,200,000	-
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	447,827,500	433,127,500	-14,700,000
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	60,300,000	60,300,000	-
	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	10,000,000	10,000,000	-
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	212,100,000	212,100,000	-
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	123,120,000	123,120,000	-
	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	42,307,500	27,607,500	-14,700,000
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	5,115,329,300	5,115,529,300	200,000
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1,645,310,000	1,645,310,000	-
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	975,310,000	975,310,000	-

**LAPORAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**



Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	369,180,000	369,180,000	-
	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	100,000,000	100,000,000	-
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	10,000,000	10,000,000	-
	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	190,820,000	190,820,000	-
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1,167,000,000	1,167,000,000	-
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1,167,000,000	1,167,000,000	-
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1,893,019,300	1,893,219,300	200,000
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	78,595,000	78,595,000	-
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1,745,425,000	1,745,425,000	-
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	38,492,000	38,492,000	-
	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	30,507,300	30,707,300	200,000
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	410,000,000	410,000,000	-

**LAPORAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**



Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	1,200,000	1,200,000	-
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	408,800,000	408,800,000	-
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2,555,970,000	2,555,970,000	-
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	206,370,000	206,370,000	-
	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	76,370,000	76,370,000	-
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	130,000,000	130,000,000	-
	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2,349,600,000	2,349,600,000	-
	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1,068,000,000	1,068,000,000	-
	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1,281,600,000	1,281,600,000	-
Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran		12,359,778,400	12,491,404,700	131,626,300

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025



**Tabel II.3.2. Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian
Sasaran Tahun 2025**

No.	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	3,325,799,377	3,161,603,153	-164,196,224
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64,038,200	51,638,200	-12,400,000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	45,380,000	32,980,000	-12,400,000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2,305,000	2,305,000	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	2,225,000	2,225,000	-
	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	1,925,000	1,925,000	-
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2,475,200	2,475,200	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5,975,000	5,975,000	-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,753,000	3,753,000	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,220,002,932	2,230,731,708	10,728,776
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,171,967,932	2,196,896,708	24,928,776
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2,090,000	2,090,000	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	45,945,000	31,745,000	1-4,200,000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	45,336,200	32,936,200	-12,400,000
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	45,336,200	32,936,200	-12,400,000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	303,232,800	226,277,800	-76,955,000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9,312,800	9,312,800	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75,275,000	75,275,000	-
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5,720,000	5,720,000	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15,044,000	15,044,000	-
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1,200,000	1,200,000	-
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4,200,000	4,200,000	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160,432,000	83,277,000	-77,155,000
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	32,049,000	32,249,000	200,000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	67,102,000	79,736,000	12,634,000
	Pengadaan Mebel	6,402,000	14,536,000	8,134,000

**LAPORAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**



No.	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30,700,000	35,200,000	4,500,000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30,000,000	30,000,000	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	188,549,125	188,549,125	-
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,000,000	3,000,000	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110,399,125	110,399,125	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	75,150,000	75,150,000	-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	437,538,120	351,734,120	-85,804,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	216,100,000	216,100,000	-
	Pemeliharaan Mebel	2,200,000	2,200,000	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11,150,000	11,150,000	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	205,088,120	117,784,120	-87,304,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3,000,000	4,500,000	1,500,000
	Total Anggaran Pendukung	3,325,799,377	3,161,603,153	-164,196,224

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025

.IV. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bupati Gunungkidul sebagai berikut:



Tabel II.4.1 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target	
			Satuan	Jumlah
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kalurahan yang baik	Persentase kalurahan yang melaporkan LPPKal tepat waktu tahun 2026	Persen	100
		Persentase desa mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2026	Persen	31,25
2.	Terwujudnya pengendalian angka kelahiran	Total Fertility Rate (TFR)	nilai	1,91

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1.	Akuntabilitas pemerintahan kalurahan dan pemberdayaan masyarakat meningkat	Persentase kalurahan yang melaporkan LPPKal tepat waktu	persen	95
		Persentase desa mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM)	persen	27,78
2.	Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah meningkat	Nilai AKIP PD	nilai	83,5
3.	PUS yang menjadi peserta KB aktif meningkat	Persentase pemakaian alat kontrasepsi modern	persen	78,16

Pada tahun 2025, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul melaksanakan reviu/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Perubahan dilakukan karena adanya refocusing kegiatan dan realokasi anggaran serta telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2025. Target kinerja pada indikator Persentase desa mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) ditentukan berdasarkan proyeksi capaian tahun 2024, hal itu dikarenakan capaian tahun 2024 sudah melebihi target



tahun 2026 (target akhir renstra). Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel II.4.2 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target	
			Satuan	Jumlah
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kalurahan yang baik	Persentase kalurahan yang melaporkan LPPKal tepat waktu tahun 2026	Persen	100
		Persentase desa mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2026	Persen	87,5
2.	Terwujudnya pengendalian angka kelahiran	Total Fertility Rate (TFR)	nilai	1,91

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1.	Akuntabilitas pemerintahan kalurahan dan pemberdayaan masyarakat meningkat	Persentase kalurahan yang melaporkan LPPKal tepat waktu	persen	95
		Persentase desa mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM)	persen	87,5
2.	Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah meningkat	Nilai AKIP PD	nilai	83,5
3.	PUS yang menjadi peserta KB aktif meningkat	Persentase pemakaian alat kontrasepsi modern	persen	78,16



Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp3.161.603.153	APBD
Program Peningkatan Kerjasama Desa	Rp7.790.000	APBD
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp3.669.128.300	APBD
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp535.310.000	APBD
Program Pengendalian Penduduk	Rp434.327.500	APBD DAK NonFisik
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp5.115.529.300	DAK NonFisik APBD
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp2.555.970.000	DAK NonFisik
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Rp173.349.600	DAIS

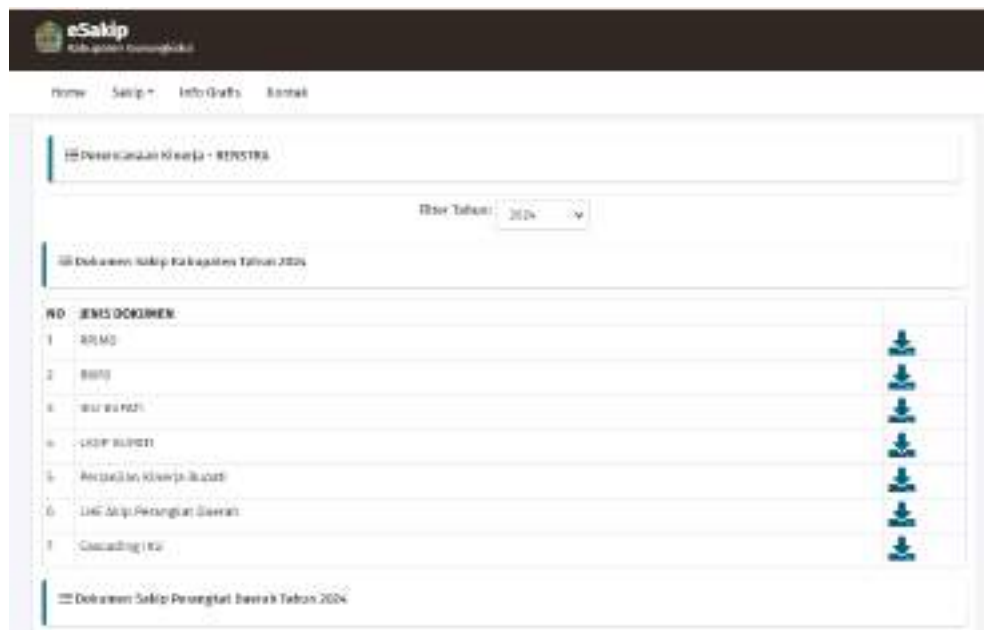
Keterangan Tambahan:

1. Target kinerja tujuan dan sasaran diproyeksikan berdasarkan proyeksi hasil capaian tahun 2024, dan volume anggaran berkurang 1,06% sehubungan adanya penyesuaian gaji dan tunjangan ASN dengan jumlah pegawai yang ada, pemenuhan sosialisasi kepada Posyandu dan Perangkat desa .
2. Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV.
3. Tidak mengelola anggaran Belanja Tidak Terduga.
4. Tidak mengelola anggaran dekonsentrasi.



.V. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

1. Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah aplikasi *e-SAKIP* (e-gov.gunungkidulkab.go.id)



Gambar II.1. Sistem Integrasi ROPK, Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP

2. Sistem Informasi Pengendalian Pelaporan dan Inovasi Daerah (SiPANDA)



Gambar II.2. Sistem Evaluasi RKPD SIPANDA



BAB III berisi:

1. Capaian Kinerja Tahun 2025
2. Capaian Kinerja Lainnya
3. Efisiensi Anggaran

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

.I. Capaian Kinerja Tahun 2025

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul dengan Bupati Gunungkidul tahun 2025. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017



Tabel III.1.2 Capaian Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2021	CAPAIAN 2024	TAHUN 2025				TARGET AKHIR RPJMD
						TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA/KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	akuntabilitas pemerintahan kalurahan dan pemberdayaan masyarakat meningkat	Persentase kalurahan yang melaporkan LPPKal tepat waktu	persen	71	90,27	95	95,14	100,15	Sangat Baik	100
		Persentase desa mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM)	persen	9,72	87,5	87,5	97,22	111,11	Sangat Baik	31,25
2	Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	nilai	76,11	82,99	83,5	83,97	100,56	Sangat Baik	84,5
3	PUS yang menjadi peserta KB aktif meningkat	persentase pemakaian alat kontrasepsi modern	persen	78,06	70,39	78,16	64,63	82,69	Tinggi	78,18

Analisis capaian kinerja tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul dianalisis secara terpadu karena menggunakan indikator kinerja yang sama atau sepadan. Kesamaan indikator tersebut menunjukkan adanya keterkaitan langsung antara tujuan dan sasaran, sehingga capaian sasaran strategis secara langsung merefleksikan tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan 1: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kalurahan yang Baik

Tujuan Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kalurahan yang Baik diukur dengan indikator kinerja persentase kalurahan yang melaporkan LPPKal tepat waktu dan persentase desa mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM). Pencapaian tujuan ini didukung oleh sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas pemerintahan kalurahan dan pemberdayaan masyarakat. Pengukuran tujuan dan sasaran strategis tersebut menggunakan indikator kinerja yang sama, sehingga analisis capaian kinerja tujuan dan sasaran dilakukan secara terpadu, dengan capaian



sasaran strategis secara langsung mencerminkan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan Dinas selama periode Renstra 2021–2026..

Persentase desa mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) pada tahun 2025 mencapai 97,22%, melampaui target tahun 2025 sebesar 87,5%, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 111,11%. Target 87,5% tersebut merupakan target kinerja yang ditetapkan khusus untuk tahun 2025. Sementara itu, dalam pengukuran capaian tujuan, digunakan target akhir Renstra tahun 2026 yang ditetapkan sebesar 31,25%. Penetapan target tujuan tersebut disesuaikan dengan kondisi capaian tahun 2024 yang telah mencapai 87,5%, sehingga target tujuan pada akhir Renstra diformulasikan berdasarkan capaian kinerja eksisting agar tetap mencerminkan peningkatan kinerja yang realistis dan berkelanjutan. Adapun analisis capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

Sasaran 1: Akuntabilitas Pemerintahan Kalurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Meningkat

Kinerja sasaran Akuntabilitas Pemerintahan Kalurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Meningkat diukur dengan indikator Nilai Pelaporan LPPKal dan Capaian Indeks Desa Membangun. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.1.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Akuntabilitas pemerintahan kalurahan dan pemberdayaan masyarakat meningkat	Persentase kalurahan yang melaporkan LPPKal tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah kalurahan yang melaporkan LPPKal tepat waktu}}{\text{Jumlah kalurahan yang melaporkan LPPKal}} \times 100$
		Persentase desa mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM)	$\frac{\text{Jumlah kalurahan mandiri berdasarkan Indeks Desa Mandiri (IDM)}}{\text{Jumlah seluruh kalurahan}} \times 100$



Capaian pada sasaran ini digambarkan pada tabel III.1.4 berikut:

**Tabel III.1.4 Capaian Sasaran
Akuntabilitas Pemerintahan Kalurahan dan Pemberdayaan Masyarakat
Meningkat**

Sasaran	Indikator Kinerja	TAHUN 2025			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Akuntabilitas pemerintahan kalurahan dan pemberdayaan masyarakat meningkat	Persentase kalurahan yang melaporkan LPPKal tepat waktu	95%	95,14%	100,15	Sangat Tinggi
	Persentase desa mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM)	87,5%	97,22%	111,11	Sangat Tinggi
RATA-RATA		91,25%	96,18%	105,65	Sangat Tinggi

Dari data tersebut diatas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar 105,65%, termasuk dalam kategori sangat tinggi dengan realisasi 96,18% yang melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 91,25%.

Pada tahun 2025 dari 144 kalurahan yang ada di Kabupaten Gunungkidul, ada 137 kalurahan yang melaporkan LPPKal tepat waktu. Sedangkan untuk Kalurahan Mandiri di tahun 2025 sebanyak 140 kalurah dan Kalurahan Maju sebanyak 4 kalurahan.

Realisasi kinerja Nilai Pelaporan LPPKal tahun 2025 sebesar 95,14% mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2024. Realisasi Indeks Desa Membangun sebesar 97,22% pada tahun 2025 mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2024.. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 dan tahun 2024, dan dibandingkan dengan target akhir Renstra di tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut:



Tabel III.1.5 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023-2025
serta perbandingan dengan target akhir Renstra di tahun 2026

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
		2023	2024	2025		
Akuntabilitas pemerintahan kalurahan dan pemberdayaan masyarakat meningkat	Persentase kalurahan yang melaporkan LPPKal tepat waktu	84,7%	90,27%	95,14%	100%	95,14
	Persentase desa mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM)	46,5%	87,5%	97,22%	31,25%	311,104

Dari evaluasi data tersebut diatas terlihat bahwa realisasi kinerja meningkat. Pencapaian target sasaran Akuntabilitas pemerintahan kalurahan dan pemberdayaan masyarakat meningkat didukung oleh program sebagai berikut:

- 1) Program Peningkatan Kerjasama Desa dengan indikator Persentase perjanjian kerjasama desa yang diimplementasikan;
- 2) Program Administrasi Pemerintahan Desa dengan indikator Persentase kalurahan yang menetapkan APBKal tepat waktu;
- 3) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dengan indikator Persentase keterlibatan lembaga kemasyarakat dalam pembangunan;
- 4) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dengan indikator Persentase kalurahan yang sudah melaksanakan urusan keistimewaan.

Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:



Tabel III.1.6 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	META INDIKATOR
1	Akuntabilitas pemerintahan kalurahan dan pemberdayaan masyarakat meningkat	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase kalurahan yang menetapkan APBKal tepat waktu	$\frac{\sum \text{kalurahan yang menetapkan APBKal tepat waktu}}{\sum \text{seluruh kalurahan}} \times 100\%$
		Program Penyelenggara n Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase kalurahan yang sudah melaksanakan urusan keistimewaan	$\frac{\sum \text{kalurahan yang sudah melaksanakan urusan keistimewaan}}{\sum \text{seluruh kalurahan}} \times 100\%$
		Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase perjanjian kerjasama desa yang diimplementasikan	$\frac{\sum \text{perjanjian kerjasama yang diimplementasikan}}{\sum \text{perjanjian kerjasama yang ditandatangani}} \times 100\%$
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan , Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase keterlibatan lembaga kemasyarakat dalam pembangunan	$\frac{\sum \text{lembaga kemasyarakatan yang terlibat dalam pembangunan}}{\sum \text{lembaga kemasyarkatan yang ada di kalurahan}} \times 100\%$

Capaian kinerja program tersaji dalam tabel III.1.7 Capaian Kinerja Program pada Sasaran Akuntabilitas pemerintahan kalurahan dan pemberdayaan masyarakat meningkat berikut:

Tabel III.1.7 Capaian Kinerja Program pada
Sasaran Akuntabilitas pemerintahan kalurahan dan pemberdayaan masyarakat meningkat

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Program	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%) Kategori
Akuntabilitas pemerintahan kalurahan dan pemberdayaan masyarakat meningkat	Persentase kalurahan yang melaporkan LPPKal tepat waktu	95,14	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase kalurahan yang menetapkan APBKal tepat waktu	100%	100%	100 Sangat tinggi

**LAPORAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**



Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Program	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%) Kategori
			Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase kalurahan yang sudah melaksanakan urusan keistimewaan	90%	100%	111,11 Sangat tinggi
	Persentase desa mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM)	97,22	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase perjanjian kerjasama desa yang diimplementasikan	100%	100%	100 Sangat tinggi
			Program Pemberdayaa n Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase keterlibatan lembaga kemasyarakat dalam pembangunan	95%	95%	100 Sangat tinggi
Rata-rata Capaian Indikator Program							102,78 Sangat tinggi

Capaian kinerja program pada sasaran Akuntabilitas Pemerintahan Kalurahan dan Pemberdayaan Masyarakat meningkat rata-rata 102,78%, sehingga masuk dalam kategori sangat tinggi.

Keberhasilan capaian Indikator program pada sasaran Akuntabilitas Pemerintahan Kalurahan dan Pemberdayaan Masyarakat meningkat tersebut didukung dari:

1. Program Administrasi Pemerintahan Desa, yang didukung kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa.
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan, yang didukung kegiatan sebagai berikut:



- a. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan.
- 3. Program Peningkatan Kerjasama Desa, yang didukung kegiatan sebagai berikut:
 - a. Fasilitasi Kerja sama antar Desa
- 4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, yang didukung kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

Gambar III.1. Foto-foto kegiatan yang relevan dengan capaian sasaran Akuntabilitas Pemerintahan Kalurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Meningkatkan



Rapat Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kalurahan



Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Reformasi Pemberdayaan
Masyarakat Kalurahan



Rapat koordinasi rencana Implementasi SAKIP Kalurahan



Faktor Pendukung Keberhasilan Sasaran

1. Digitalisasi tata kelola pemerintahan daerah dan kalurahan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja.
2. Adanya asosiasi, paguyuban, lembaga kemasyarakatan, forum CSR, dan tenaga pendamping desa yang berkomitmen mendukung pelaksanaan program kegiatan.

Faktor Penghambat Keberhasilan Sasaran

Faktor yang menghambat keberhasilan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul antara lain:

1. Keterbatasan pagu anggaran sehingga fasilitasi dan pendampingan kurang optimal
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia
3. Keterbatasan Waktu

Solusi/strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan kerjasama dengan pihak terkait
2. Memaksimalkan Swadaya dari Masyarakat di lokasi pelaksanaan kegiatan
3. Melakukan kolaborasi dengan anggaran Dana Keistimewaan

Sasaran 2: Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Meningkat

Kinerja sasaran Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Meningkat diukur dengan indikator Nilai AKIP PD. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:



Tabel III.1.8 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3
Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	Indikator ini mengukur kualitas implementasi AKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana Tahun n-1. Dasar Pengukuran adalah PermenpanRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Nilai AKIP PD merupakan hasil akhir penjumlahan nilai tertimbang dari komponen: 1. Perencanaan kinerja bobot 30%; 2. Pengukuran kinerja bobot 30%; 3. Pelaporan Kinerja bobot 15%; 4. Evaluasi kinerja internal bobot 25%. Interpretasi: Predikat AA (Nilai >90-100) Predikat A (Nilai >80-90) Predikat BB (Nilai >70-80) Predikat B (Nilai >60-70) Predikat CC (Nilai >50-60) Predikat C (Nilai >30-50) Predikat D (Nilai >0-30)

Berdasarkan surat dari Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 700.1.2.7/EV-LKJ/02 tanggal 19 Maret 2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Internal pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMKP2KB) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024, mendapatkan nilai 83,97 masuk kategori A (Memuaskan).



Tabel III.1.9 Capaian Sasaran
Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Meningkat

Sasaran	Indikator Kinerja	TAHUN 2025			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	83,5	83,97	100,56	Sangat Tinggi

Dari data tersebut diatas terlihat dari target yang ditetapkan sebesar 83,5 terealisasi 83,97 sehingga capaian kinerja sebesar 100,56%. Dalam LHE AKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2024 terdapat beberapa rekomendasi yang harus ditindaklanjuti dan telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi.

Tindak lanjut atas catatan saran/ rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut

NO	CATATAN	SARAN/ REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1.	PERENCANAAN KINERJA		
	Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja pada sasaran strategis belum menantang hal tersebut dapat dilihat dari realisasi tahun sebelumnya belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perencanaan dimana realisasi tahun sebelumnya untuk 2 (dua) indikator sasaran strategis melebihi target tahun 2024, dan rata-rata capaian target indikator kinerja atas sasaran	Melakukan reviu dan perbaikan perencanaan kinerja untuk memastikan rumusan target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja dapat tercapai (achieveable), menantang, dan realistis	Telah kami tindaklanjuti dengan mencantumkan proyeksi target tujuan maupun sasaran pada dokumen Renja Perubahan 2025. Target tujuan dan sasaran Renstra 2025-2029 juga sudah disesuaikan

**LAPORAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**



NO	CATATAN	SARAN/ REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
	strategis tahun 2024 sebesar 230,115% (sangat tinggi) melebihi target yang ditetapkan sebesar 57,16%.		
2.	PENGUKURAN KINERJA		
	Data kinerja yang disajikan belum mewakili (representative) kinerja (sasaran) atau kondisi yang akan diwujudkan, hal tersebut disebabkan target kinerja yang digunakan dalam mengukur kinerja menggunakan perjanjian kinerja awal (sebelum perubahan)	Memastikan keselarasan data kinerja antara lain nilai target kinerja pada perjanjian kinerja dengan perhitungan capaian kinerja yang tersaji dalam laporan	Telah kami tindaklanjuti dengan mencantumkan target tujuan dan sasaran sesuai dengan proyeksi target tujuan dan sasaran. Target tujuan dan sasaran Renstra 2025-2029 juga sudah disesuaikan
3.	PELAPORAN KINERJA		
	Laporan kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan dan membandingkan realisasi kinerja dengan target tahunan, namun target kinerja yang telah diperjanjikan yang disajikan dalam laporan merupakan dokumen perjanjian kinerja (sebelum perubahan) sehingga terdapat perubahan target yang belum disajikan dalam laporan.	Memastikan keselarasan data kinerja antara lain nilai target kinerja pada perjanjian kinerja dengan penyajian dalam laporan	Telah kami tindaklanjuti dengan mencantumkan target tujuan dan sasaran sesuai dengan proyeksi target tujuan dan sasaran. Target tujuan dan sasaran Renstra 2025-2029 juga sudah disesuaikan
4.	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL		
	Tidak terdapat catatan	Tidak terdapat rekomendasi	NIHIL



Tabel III.1.10 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023-2025 serta
Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di tahun 2026

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
		2023	2024	2025		
Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	82,99	83,97	83,97*)	84.5	99,37

*)Nilai AKIP n-1 atau Tahun 2024

Dari evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa realisasi kinerja terus meningkat. Program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten terlaksana dengan baik. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.1.11 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	META INDIKATOR
2	Akuntabilitas kinerja PD meningkat	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	Rata-rata capaian pelaksanaan kegiatan x 100%

Tabel III.1.12 Capaian Kinerja Program Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Program	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%) Kategori
Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	100,56	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terfasilitasi	100	100	100 Sangat Tinggi



Capaian kinerja program pada Sasaran Akuntabilitas Kinerja PD meningkat rata-rata 100%, sehingga masuk dalam kategori sangat tinggi.

Keberhasilan capaian Indikator program pada Sasaran Akuntabilitas Kinerja PD Meningkat tersebut didukung dari:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang di dukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.



**Gambar III.2 Foto-foto yang Relevan dengan Capaian Sasaran Akuntabilitas
Kinerja Perangkat Daerah Meningkatkan**



Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Program Kegiatan Tahun 2025



Sosialisasi, Internalisasi dan Evaluasi Budaya Pemerintahan SATRIYA



Faktor Penghambat Keberhasilan Sasaran

Faktor yang menghambat keberhasilan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul antara lain:

1. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah;
2. Minimnya SDM sehingga terjadi kekosongan personil di beberapa jabatan

Solusi/strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mengajukan usulan penambahan sarana prasarana melalui permohonan usulan RKBMD yang kemudian ditindaklanjuti saat penyusunan RKA;
2. Pemberian surat tugas untuk mengampu jabatan yang kosong.

Tujuan 2 Terwujudnya Pengendalian Angka Kelahiran

Capaian tujuan Terwujudnya Pengendalian Angka Kelahiran diukur melalui indikator Total Fertility Rate (TFR), sedangkan pencapaian sasaran PUS yang menjadi peserta KB aktif meningkat diukur melalui indikator persentase pemakaian alat kontrasepsi modern. Kedua indikator tersebut memiliki keterkaitan yang erat, dimana peningkatan partisipasi PUS dalam penggunaan alat kontrasepsi modern secara langsung berkontribusi terhadap pengendalian angka kelahiran.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, indikator TFR pada tahun 2025 tercatat sebesar 1,90 sementara target yang ditetapkan sebesar 1,91, sehingga target TFR belum tercapai. Dibandingkan capaian tahun 2024 sebesar 1,89, nilai Total Fertility Rate (TFR) tahun 2025 mengalami kenaikan, namun tetap berada pada rentang yang terkendali. Kondisi ini menunjukkan bahwa program pengendalian penduduk masih berjalan efektif dan mampu menjaga stabilitas angka kelahiran.



Sasaran: PUS yang Menjadi Peserta KB Aktif Meningkat

Kinerja sasaran PUS yang menjadi peserta KB aktif meningkat diukur dengan indikator Nilai persentase pemakaian alat kontrasepsi modern. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.1.13 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	PUS yang menjadi peserta KB aktif meningkat	persentase pemakaian alat kontrasepsi modern	$\frac{\sum \text{Pasangan usia subur (PUS) yang memakai alat kontrasepsi modern}}{\sum \text{seluruh pasangan usia subur (PUS)}} \times 100$

Capaian pada sasaran ini digambarkan pada tabel III.1.14 berikut:

Tabel III.1.14 Capaian Sasaran
PUS yang menjadi peserta KB aktif meningkat

Sasaran	Indikator Kinerja	TAHUN 2025			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
PUS yang menjadi peserta KB aktif meningkat	persentase pemakaian alat kontrasepsi modern	78,16	64,63	82,69	Tinggi

Dari data tersebut diatas terlihat bahwa capaian PUS yang menjadi peserta KB aktif meningkat pada tahun 2025 belum mencapai target, dengan realisasi sebesar 64,63% dari target 78,16%, atau tingkat capaian sebesar 82,69%.

Pada tahun 2025 Pasangan Usia Subur (PUS) di Kabupaten Gunungkidul sebanyak 105.033 pasangan, dan yang memakai alat kontrasepsi modern sebanyak 67.879 akseptor. Adapun rinciannya adalah 28.125 suntik, 6.235 pil, 6.598 kondom, 11.563 implan, 12.754 IUD, 119 Vasektomi, 2.464 tubektomi, 21 MAL.



Realisasi kinerja sebesar 64,63% pada tahun 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan pada tahun 2024. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 dan tahun 2024, dan dibandingkan dengan target akhir Renstra di tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel III.1.15 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023-2025 serta perbandingan dengan target akhir Renstra di tahun 2026

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
		2023	2024	2025		
PUS yang menjadi peserta KB aktif meningkat	persentase pemakaian alat kontrasepsi modern	72,47	70,63	64,63	78,18	82,67

Dari evaluasi data tersebut diatas terlihat bahwa realisasi kinerja menurun. Pencapaian target sasaran PUS yang menjadi peserta KB aktif meningkat didukung oleh program sebagai berikut:

- 1) Program Pengendalian Penduduk dengan indikator Median usia kawin pertama perempuan (MUKP) seluruh wanita usia 25 - 49 tahun;
- 2) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dengan indikator persentase kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (unmet need);
- 3) Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) dengan indikator persentase Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang aktif.

Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:



Tabel III.1.16 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	META INDIKATOR
1	PUS yang menjadi peserta KB aktif meningkat	Program Pengendalian Penduduk	Median usia kawin pertama perempuan (MUKP) seluruh wanita usia 25 - 49 tahun	Rata-rata menikah pertama diambil dari Kemenag dan Dukcapil
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	persentase kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	$\frac{\sum \text{unmet need}}{\sum \text{pasangan usia subur}} \times 100\%$
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	persentase Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang aktif	$\frac{\sum \text{kelompok bina keluarga sejahtera yang aktif}}{\sum \text{kelompok bina keluarga sejahtera yang ada}} \times 100\%$

Capaian kinerja program tersaji dalam tabel III.1.17 Capaian Kinerja Program pada Sasaran Akuntabilitas pemerintahan kalurahan dan pemberdayaan masyarakat meningkat berikut:

Tabel III.1.17 Capaian Kinerja Program pada Sasaran PUS yang menjadi peserta KB aktif meningkat

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%) Kategori
PUS yang menjadi peserta KB aktif meningkat	persentase pemakaian alat kontrasepsi modern	82,69	Program Pengendalian Penduduk	Median usia kawin pertama perempuan (MUKP) seluruh wanita usia 25 - 49 tahun	23 tahun	21 tahun	91,30 Sangat Tinggi
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	persentase kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	8,15%	8,42%	103,31 Sangat Tinggi
			Program Pemberdayaa	persentase Kelompok	80%	80%	100 Sangat

**LAPORAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**



Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%) Kategori
			n Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang aktif			Tinggi
Rata-rata Capaian Indikator Program							98,20 Sangat Tinggi

Capaian kinerja program pada sasaran PUS yang menjadi peserta KB aktif meningkat rata-rata 98,20%, sehingga masuk dalam kategori sangat tinggi.

Keberhasilan capaian Indikator program pada sasaran PUS yang menjadi peserta KB aktif meningkat tersebut didukung dari:

1. Program Pengendalian Penduduk, yang didukung kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk;
 - b. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), yang didukung kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
 - b. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
 - c. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota



- d. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
- 3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS), yang didukung kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - b. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Gambar III.3 Foto-foto Kegiatan yang Relevan dengan Capaian Sasaran PUS yang Menjadi Peserta KB Aktif Meningkat



Baksos Pelayanan KB MKJP dan Sosialisasi serta penguatan KB MKJP dalam rangka Hari Kontrasepsi Sedunia Tahun 2025



Launching GENTING Kapanewon Patuk

Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Standar Atau Unit Organisasi Lain

Perbandingan capaian kinerja dengan standar atau unit organisasi lain tidak dapat dilakukan karena keterbatasan ketersediaan data kinerja yang terpublikasi dan dapat diperbandingkan secara seragam antar perangkat daerah.

Faktor Penghambat Keberhasilan Sasaran

Faktor yang menghambat keberhasilan sasaran PUS yang menjadi peserta KB aktif meningkat antara lain

1. Banyaknya pernikahan di bawah usia 20 tahun
2. Tingkat kesadaran masyarakat penggunaan MKJP masih rendah
3. Kurangnya petugas Lini Lapangan/ PKB yang tidak sebanding dengan jumlah desa yang diampu

Solusi/strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi tentang kontrasepsi MKJP baik melalui tatap muka, media cetak, talkshow melalui youtube, dan pagelaran wayang cakruk.
2. Koordinasi dengan BKKBN Perwakilan Prov. DIY terkait adanya kekurangan personil PLKB



3. Melakukan konseling dan pendataan Caten melalui aplikasi elsimil untuk mencegah stunting
4. Pelaksanaan Gerakan Orangtua Asuh Cegah Stunting (GENTING) pada seluruh kapanewon di Kabupaten Gunungkidul

II. Capaian Kinerja Lainnya

Pengukuran capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana meliputi capaian kinerja untuk tujuan dan sasaran strategis. Untuk capaian kinerja lainnya adalah:

A. Capaian SDG'S Tahun 2025

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana. Dalam hal ini, menampilkan capaian kinerja SDG's sebagai berikut:

Tabel III.2 Capaian SDG's Tahun 2025

Kode	Nama Indikator	Satuan	Capaian 2025	
			Sem I	Sem II
Tujuan I : MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN				
1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.				
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	persen	70,68	64,63
TUJUAN 3 : Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia				
3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.				

**LAPORAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**



Kode	Nama Indikator	Satuan	Capaian 2025	
			Sem I	Sem II
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	persen	70,24	58,23
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	persen	70,68	64,63
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	persen	26,48	25,61
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).		13,5	13,5
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR)	persen	1,89	1,89
TUJUAN 5 : MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN				
5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.				
5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi)	persen	8,24	8,42
5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	persen	100	100
TUJUAN 10 : MENGURANGI KESENJANGAN INTRA - DAN ANTARNEGARA				
10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.				
10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal	desa	0	0
10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri	desa	140	140



B. Capaian Kinerja Pelayanan Publik

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengacu pada prinsip pelayanan publik ramah kelompok rentan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan.

Fasilitas penunjang disediakan untuk dapat memberikan layanan tempat, keamanan, serta kenyamanan kepada masyarakat, dengan akses yang mudah dan perlakuan yang sama, tidak diskriminatif, dan ada perlakuan khusus bagi kelompok berkebutuhan khusus. Fasilitas yang tersedia diantaranya:

1. Ruang laktasi yang dimiliki berukuran 3,75 m² dilengkapi dengan fasilitas sofa dan AC, sehingga memberikan kenyamanan bagi penggunanya.
2. Bangunan ramah disabilitas berupa pintu masuk yang mudah diakses, dilengkapi dengan ramp, namun belum disertai pegangan rambat.
3. Halaman luas yang dapat digunakan sebagai arena bermain anak maupun untuk parkir khusus yang mudah diakses
4. Kawasan tanpa rokok dengan menyediakan area merokok di luar ruang pelayanan.
5. Sarana dan prasarana konsultasi dan pengaduan
6. Penyediaan fasilitas sanitasi sebagai upaya menjaga kebersihan dan kesehatan



Gambar III.4 Sarana dan Prasarana Bagi Kelompok Rentan



Untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana secara konsisten melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) setiap semester. Pengukuran IKM dilakukan dengan menggabungkan seluruh layanan pada masing-masing bidang, yaitu:

- a. Sekretariat
- b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- c. Bidang Bina Administrasi dan Pemerintah Kalurahan
- d. Bidang Bina Perencanaan, Keuangan dan Kekayaan Kalurahan
- e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa rata-rata nilai IKM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 mencapai 83,31 dengan kategori



Baik. Nilai ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan rata-rata capaian tahun 2024 yang sebesar 81,56 yang menunjukkan adanya perbaikan persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan.

Peningkatan nilai IKM tersebut mencerminkan bahwa upaya perbaikan pelayanan, baik dari aspek prosedur pelayanan, kejelasan informasi, maupun sikap dan responsivitas petugas, telah memberikan dampak positif terhadap tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan.

Hasil pengukuran IKM ini selanjutnya digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar perumusan langkah perbaikan pelayanan publik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun 2026.

C. Capaian Kinerja terkait dengan Pengarusutamaan Gender

Perspektif pengarusutamaan gender Pengarusutamaan gender (PUG) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diintegrasikan dalam seluruh tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program dan kegiatan, baik fisik maupun nonfisik. Implementasi PUG bertujuan memastikan agar setiap output dan outcome program bersifat responsif dan sensitif gender, dengan memperhatikan pemenuhan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat bagi lima kelompok afirmatif gender, yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas.

Pada tahun 2025, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah menyusun Gender Analysis Pathway beserta Kerangka Acuan Kerja pada masing-masing bidang minimal 1 (satu) sub kegiatan sebagai dasar integrasi perspektif gender dalam perencanaan dan penganggaran. Adapun sub kegiatan yang telah disusun Gender



Analysis Pathway (GAP) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) adalah sebagai berikut:

1. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
2. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
3. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
4. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Implementasi sub kegiatan tersebut telah dilaksanakan pada tahun 2025 dengan memperhatikan prinsip kesetaraan dan keadilan gender, antara lain mendorong peningkatan partisipasi perempuan dan laki-laki secara lebih seimbang, melalui keterlibatan aktif perempuan dalam proses perencanaan pembangunan desa dan keanggotaan BPD, penguatan peran Tim Penggerak PKK dalam pemberdayaan keluarga, serta meningkatnya akses dan kesadaran Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Gambar III.5 Kegiatan Berperspektif Gender



Penguatan Kapasitas Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Berkinerja Baik Dalam Konvergensi Pencegahan Dan Percepatan Penurunan Stunting



Monitoring GKSTTB Peduli KIA Di Kalurahan Dadapayu Oleh TP PKK DIY
Bidang IV



Lokalatih Pengintegrasian Pengurangan Risiko Bencana Dan Adaptasi
Perubahan Iklim Ke Dalam Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan
Desa Yang Inklusif Dan Ramah Lingkungan

D. INOVASI

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparaturnya untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya manusia harus dipandang sebagai pemicu



gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain:

1. Pemanfaatan media google drive dalam pengumpulan data dari masing-masing bidang;
2. Pemanfaatan aplikasi siskeudes online untuk memudahkan pelaksanaan tugas fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul;
3. Pemanfaatan aplikasi SIRIKA dan SIGA untuk mendukung pencapaian kinerja pada bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
4. Pemanfaatan media sosial berupa NgeVlog bareng pegawai penyuluh KB dalam rangka sosialisasi program Keluarga Berencana.

III. Efisiensi Anggaran

Anggaran belanja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor DPPA/A.4/2.08.2.14.2.13.01.0000/001/2025 tertanggal 4 November 2025 mendapat alokasi dana sejumlah Rp.15.653.007.853,00 dan telah menyerap anggaran sebesar Rp.14.773.362.509,00 atau 94,38%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.879.645.344,00.

Anggaran dan realisasi belanja untuk Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan dalam tabel III.3.1 berikut:

**LAPORAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**



Tabel III.3.1 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Selisih (Rp.)	Efisiensi (%)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	3,161,603,153	2,905,880,635	91.91	255,722,518	8.09
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51,638,200	49,958,102	96.75	1,680,098	3.25
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32,980,000	31,299,902	94.91	1,680,098	5.09
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2,305,000	2,305,000	100	-	0.00
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2,225,000	2,225,000	100	-	0.00
1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1,925,000	1,925,000	100	-	0.00
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2,475,200	2,475,200	100	-	0.00
1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5,975,000	5,975,000	100	-	0.00
1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,753,000	3,753,000	100	-	0.00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,230,731,708	2,037,662,860	91.35	193,068,848	8.65
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,196,896,708	2,006,067,860	91.31	190,828,848	8.69
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2,090,000	2,090,000	100	-	0.00
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	31,745,000	29,505,000	92.94	2,240,000	7.06
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	32,936,200	28,633,606	86.94	4,302,594	13.06

**LAPORAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**



No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Selisih (Rp.)	Efisiensi (%)
3.1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	32,936,200	28,633,606	86.94	4,302,594	13.06
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	226,277,800	215,652,225	95.30	10,625,575	4.70
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9,312,800	9,312,800	100	-	0.00
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75,275,000	74,959,800	99.58	315,200	0.42
4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5,720,000	5,720,000	100	-	0.00
4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15,044,000	15,044,000	100	-	0.00
4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1,200,000	1,200,000	100	-	0.00
4.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4,200,000	4,200,000	100	-	0.00
4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	83,277,000	72,966,625	87.62	10,310,375	12.38
4.8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	32,249,000	32,249,000	100	-	0.00
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	79,736,000	73,744,350	92.49	5,991,650	7.51
5.1	Pengadaan Mebel	14,536,000	14,229,500	97.89	306,500	2.11
5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35,200,000	29,564,850	83.99	5,635,150	16.01
5.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30,000,000	29,950,000	99.83	50,000	0.17
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	188,549,125	148,513,792	78.77	40,035,333	21.23
6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,000,000	3,000,000	100	-	0.00
6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110,399,125	70,496,728	63.86	39,902,397	36.14
6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	75,150,000	75,017,064	99.82	132,936	0.18

**LAPORAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**



No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Selisih (Rp.)	Efisiensi (%)
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	351,734,120	351,715,700	99.99	18,420	0.01
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	216,100,000	216,100,000	100	-	0.00
7.2	Pemeliharaan Mebel	2,200,000	2,200,000	100	-	0.00
7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11,150,000	11,150,000	100	-	0.00
7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	117,784,120	117,765,700	99.98	18,420	0.02
7.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4,500,000	4,500,000	100	-	0.00
II	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	7,790,000	7,789,882	100	118	0.00
1	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	7,790,000	7,789,882	100	118	0.00
1.1	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	7,790,000	7,789,882	100	118	0.00
III	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	3,669,128,300	3,469,227,138	94.55	199,901,162	5.45
1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	3,669,128,300	3,469,227,138	94.55	199,901,162	5.45
1.1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	35,404,900	35,404,722	100	178	0.00
1.2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	6,000,000	5,999,822	100	178	0.00
1.3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	22,665,000	22,663,895	100	1,105	0.00

**LAPORAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**



No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Selisih (Rp.)	Efisiensi (%)
1.4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	34,780,000	34,429,378	98.99	350,622	1.01
1.5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	34,615,000	34,614,831	100	169	0.00
1.6	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	1,500,000	1,500,000	100	-	0.00
1.7	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	22,930,100	22,929,792	100	308	0.00
1.8	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	3,400,000	3,399,908	100	92	0.00
1.9	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3,238,237,200	3,040,091,274	93.88	198,145,926	6.12
1.10	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	7,260,000	7,259,961	100	39	0.00
1.11	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	64,425,000	63,024,416	97.83	1,400,584	2.17
1.12	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	13,916,000	13,915,792	100	208	0.00
1.13	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	2,000,100	2,000,061	100	39	0.00
1.14	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	181,995,000	181,993,286	100	1,714	0.00
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	535,310,000	535,273,165	99.99	36,835	0.01

**LAPORAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**



No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Selisih (Rp.)	Efisiensi (%)
1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	535,310,000	535,273,165	99.99	36,835	0.01
1.1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	81,670,000	81,669,683	100	317	0.00
1.2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	37,495,000	37,494,883	100	117	0.00
1.3	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	11,600,000	11,599,935	100	65	0.00
1.4	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	274,790,000	274,783,084	100	6,916	0.00
1.5	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	129,755,000	129,725,580	99.98	29,420	0.02

**LAPORAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**



No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Selisih (Rp.)	Efisiensi (%)
V	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	434,327,500	418,886,608	96.44	15,440,892	3.56
1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	1,200,000	1,200,000	100	-	0.00
1.1	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	1,200,000	1,200,000	100	-	0.00
2	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	433,127,500	417,686,608	96.44	15,440,892	3.56
2.1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	60,300,000	60,299,428	100	572	0.00
2.2	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	10,000,000	10,000,000	100	-	0.00
2.3	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	212,100,000	212,100,000	100	-	0.00
2.4	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	123,120,000	115,614,680	93.90	7,505,320	6.10
2.5	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	27,607,500	19,672,500	71.26	7,935,000	28.74

**LAPORAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**



No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Selisih (Rp.)	Efisiensi (%)
VI	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	5,115,529,300	4,735,913,294	92.58	379,616,006	7.42
1	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1,645,310,000	1,563,604,095	95.03	81,705,905	4.97
1.1	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	975,310,000	893,620,879	91.62	81,689,121	8.38
1.2	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	369,180,000	369,166,327	100	13,673	0.00
1.3	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	100,000,000	99,997,500	100	2,500	0.00
1.4	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	10,000,000	10,000,000	100	-	0.00
1.5	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	190,820,000	190,819,389	100.00	611	0.00
2	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1,167,000,000	1,166,980,258	100.00	19,742	0.00
2.1	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat	1,167,000,000	1,166,980,258	100	19,742	0.00

**LAPORAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**



No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Selisih (Rp.)	Efisiensi (%)
	Pedesaan (IMP)					
3	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1,893,219,300	1,595,335,910	84.27	297,883,390	15.73
3.1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	78,595,000	61,940,000	78.81	16,655,000	21.19
3.2	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1,745,425,000	1,464,197,000	83.89	281,228,000	16.11
3.3	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	38,492,000	38,491,649	100	351	0.00
3.4	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	30,707,300	30,707,261	100	39	0.00
4	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	410,000,000	409,993,031	100	6,969	0.00
4.1	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	1,200,000	1,200,000	100.00	-	0.00

**LAPORAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**



No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Selisih (Rp.)	Efisiensi (%)
4.2	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	408,800,000	408,793,031	100	6,969	0.00
VII	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2,555,970,000	2,530,895,453	99.02	25,074,547	0.98
1	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	206,370,000	181,295,453	87.85	25,074,547	12.15
1.1	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	76,370,000	76,367,153	100	2,847	0.00
1.2	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	130,000,000	104,928,300	80.71	25,071,700	19.29
2	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2,349,600,000	2,349,600,000	100	-	0.00
2.1	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1,068,000,000	1,068,000,000	100	-	0.00

**LAPORAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**



No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Selisih (Rp.)	Efisiensi (%)
2.2	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1,281,600,000	1,281,600,000	100	-	0.00
VIII	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	173,349,600	169,496,334	97.78	3,853,266	2.22
1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	173,349,600	169,496,334	97.78	3,853,266	2.22
1.1	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	173,349,600	169,496,334	97.78	3,853,266	2.22
TOTAL		15,653,007,853	14,773,362,509	94.38	879,645,344	5.62

Sumber Data: Laporan Keuangan Tahun 2025 Sub Bagian Perencanaan

Sedangkan anggaran dan realisasi belanja tahun 2025 yang dialokasikan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut:



Tabel III.3.2 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Sasaran Strategis/ Pendukung	Kinerja			Anggaran			Efisiensi	
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Anggaran	%
1.	Akuntabilitas Pemerintahan Kalurahan dan Pemberdayaan Masyarakat meningkat	95	95.14	100.15	4,385,577,900	4,181,786,519	95.35	203.791.381	4.65
		27.78	97.22	349.96					
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	83.5	83.97	100.56	3,161,603,153	2,905,880,635	91.91	255.722.518	8.09
3.	PUS yang menjadi peserta KB aktif meningkat	78.16	64.63	82.69	8,105,826,800	7,685,695,355	95	420.131.445	5
	Jumlah Belanja Total				15,653,007,853	14,773,362,509	94.38	879.645.344	5.62
	Jumlah Belanja Program Utama				12,491,404,700	11,867,481,874	95	623.922.826	5
	Jumlah Belanja Program Penunjang				3,161,603,153	2,905,880,635	91.91	255.722.518	8.09

Sumber Data : Subbagian Perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2025

Berdasarkan tabel III.3.2 di atas capaian kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul mencapai target kinerja tahun 2025 dengan realisasi anggaran capaian dari total belanja operasional program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp15.653.007.853,00 terealisasi Rp14.773.362.509,00 atau 94,38% sehingga dapat dikatakan terdapat efisiensi Rp879.645.344,00 atau 5,62% yang bersumber dari:

- Sisa belanja pegawai
- Sisa belanja barang dan jasa
- Efisiensi belanja perjalanan dinas
- Sisa pembayaran BPJS Perangkat Desa



BAB IV berisi:

1. *Kesimpulan*
2. *Langkah Perbaikan Kinerja*

BAB IV

PENUTUP

.I. Kesimpulan

Hasil laporan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hambatan permasalahan kinerja:
 - a. Terbatasnya jumlah pegawai, sangat mempengaruhi kinerja organisasi;
 - b. Sarana dan prasarana terbatas, terutama kendaraan dinas, komputer/ laptop, dan printer.
2. Faktor kunci keberhasilan:
 - a. Tim kerja yang komunikatif dan solid, adanya THL/tenaga kontrak serta adanya upaya peningkatan kompetensi pegawai melalui diklat sehingga SDM yang ada dapat dimaksimalkan kinerjanya;
 - b. Memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada untuk mendukung tercapainya target kegiatan;
 - c. Dukungan dari stakeholder dan adanya komunikasi yang baik dengan berbagai elemen terkait di luar Perangkat Daerah.

.II. Langkah Perbaikan Kinerja

Langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Permohonan penambahan jumlah pegawai yang diperlukan;
2. Penambahan sarana prasarana atau perbaikan sarana prasarana yang diperlukan;
3. Koordinasi dengan instansi terkait untuk peningkatan capaian kinerja.



LAMPIRAN

- 1. PK Th 2025 beserta perubahannya*
- 2. LHE AKIP 2024*
- 3. Tindak Lanjut LHE AKIP 2024*



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

ꦢꦶꦤꦱ꧀ꦧꦺꦫꦢꦂꦪꦤ꧀ꦩꦱꦶꦫꦫꦏꦠ꧀ꦢꦤ꧀ꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀
ꦥꦺꦁꦺꦤꦢꦭꦶꦁꦥꦺꦤꦢꦸꦏꦠꦤ꧀ꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦧꦺꦫꦺꦤꦏꦤ

Alamat: Jln. Taman Bhakti No. 1B Wonosari, Gunungkidul, Kode Pos 55813 Telp (0274) 391411
posel: pemberdayaan@gunungkidulkab.go.id Laman: pemberdayaan.gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. SUJARWO, M.Si.

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu.

Nama : SUNARYANTA

Jabatan : Bupati Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

SUNARYANTA

Wonosari, 6 Januari 2025
Pihak Kesatu,

Drs. SUJARWO, M.Si.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kalurahan yang baik	Persentase kalurahan yang melaporkan LPPKal tepat waktu tahun 2026	Persen	100
		Persentase desa mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2026	Persen	31,25
2.	Terwujudnya pengendalian angka kelahiran	Total Fertility Rate (TFR)	nilai	1,91

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Akuntabilitas pemerintahan kalurahan dan pemberdayaan masyarakat meningkat	Persentase kalurahan yang melaporkan LPPKal tepat waktu	persen	95
		Persentase desa mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM)	persen	27,78
2.	Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah meningkat	Nilai AKIP PD	nilai	83,5
3.	PUS yang menjadi peserta KB aktif meningkat	Persentase pemakaian alat kontrasepsi modern	persen	78,16

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp3.325.799.377	APBD
2.	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Rp8.730.000	APBD
3.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp3.445.361.600	APBD
4.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp538.830.000	APBD
5.	Program Pengendalian Penduduk	Rp449.027.500	APBD DAK NonFisik
6.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp5.115.329.300	DAK NonFisik APBD
7.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp2.555.970.000	DAK NonFisik
8.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Rp246.530.000	DAIS

Pinak Kedua



SUNARYANTA

Wonosari, 6 Januari 2025

Pinak Kesatu,



ADIS SUJARWO, M.Si.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Tercapainya pemenuhan penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	persen	100
1.1	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	indeks	4.433
1.2	Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	laporan	14
1.3	Tersusunnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	dokumen	6
1.4	Tersusunnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi umum terlayani	kegiatan	10
1.5	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	unit	17
1.6	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	kegiatan	6
1.7	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	unit	438

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 3,325,799,377	DAU
1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 64,038,200	DAU
1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 2,220,002,932	DAU
1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 45,336,200	DAU
1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 303,232,800	DAU
1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 67,102,000	DAU
1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 188,549,125	DAU
1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 437,538,120	DAU

Wonosari, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,

Drs. SUJARWO, M.Si.

Pihak Kesatu,

MUHAMMAD FARKHAN, S.Sos., MAP



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

ꦏꦁꦏꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦁꦏꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦁꦏꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ
ꦏꦁꦏꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦁꦏꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦁꦏꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Alamat: Jln. Taman Bhakti No. 1B Wonosari, Gunungkidul. Kode Pos 55813. Telp (0274) 391411
posel: pemberdayaan@gunungkidulkab.go.id Laman: pemberdayaan.gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUHARTI, S.Sos.

Jabatan : Kepala Subbagian Umum Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : MUHAMMAD FARKHAN, S.Sos.,MAP.

Jabatan : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

MUHAMMAD FARKHAN, S.Sos.,MAP.

Wonosari, 6 Januari 2025

Pihak Kesatu,

SUHARTI, S.Sos.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUB BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokumen	6
2	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	12
3	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	17
4	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	12
5	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	12
6	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	288
7	Terfasilitasinya Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	12
8	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	45
9	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	4
10	Terlaksananya Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	6
11	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	3
12	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	4
13	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	12
14	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	12
15	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	16
16	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	274
17	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	35
18	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	27
19	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1
20	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	10
21	Terselenggaranya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	4

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp. 45,336,200	DAU
2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 9,312,800	DAU
3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 75,275,000	DAU
4 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 5,720,000	DAU
5 Penyediaan Barang Celakan dan Penggandaan	Rp. 15,044,000	DAU
6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 1,200,000	DAU
7 Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp. 4,200,000	DAU
8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 160,432,000	DAU
9 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp. 32,049,000	DAU
10 Pengadaan Mebel	Rp. 6,402,000	DAU
11 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 30,700,000	DAU
12 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 30,000,000	DAU
13 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 3,000,000	DAU
14 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 110,399,125	DAU
15 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 75,150,000	DAU
16 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 216,100,000	DAU
17 Pemeliharaan Mebel	Rp. 2,200,000	DAU
18 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 11,150,000	DAU
19 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 205,088,120	DAU
20 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 3,000,000	DAU
21 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 3,753,000	DAU

Wonosari, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,



MUHAMMAD FARKHAN, S.Sos., MAP

Pihak Kesatu,



SUHARTI, S.Sos.



Alamat: Jln. Taman Bhakti No. 1B Wonosari, Gunungkidul. Kode Pos 55813. Telp (0274) 391411
 posel: pemberdayaan@gunungkidulkab.go.id Laman: pemberdayaan.gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BENEDIKTUS YULIANTORO, SST.

Jabatan : Kepala Subbagian Keuangan Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : MUHAMMAD FARKHAN, S.Sos.,MAP.

Jabatan : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,



MUHAMMAD FARKHAN, S.Sos.,MAP.

EDIKTUS YULIANTORO,

BENEDIKTUS YULIANTORO, SST.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN SEKRETARIAT DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	414
2	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1
3	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	13

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 2,171,967,932	DAU
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 2,090,000	DAU
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp. 45,945,000	DAU

Wonosari, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,



MUHAMMAD FARKHAN, S.Sos., MAP

Pihak Kesatu,



BENEDIKTUS YULIANTORO, SST.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦁꦏꦶꦢꦸꦭ
ꦢꦶꦤꦱꦧꦺꦩꦼꦂꦢꦺꦴꦪꦂꦩꦱꦶꦫꦫꦏꦏꦺꦴꦭꦫꦤ꧀
ꦥꦺꦁꦺꦤꦢꦺꦭꦶꦤ꧀ꦥꦺꦤꦢꦸꦏꦏꦺꦴꦭꦁꦧꦺꦂꦺꦤꦕꦤ

Alamat: Jln. Taman Bhakti No. 1B Wonosari, Gunungkidul. Kode Pos 55813. Telp (0274) 391411
posel: pemberdayaan@gunungkidulkab.go.id Laman: pemberdayaan.gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDANG SUPRPTO, S.IP.

Jabatan : Ketua Tim Kerja Perencanaan Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : MUHAMMAD FARKHAN, S.Sos.,MAP.

Jabatan : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

MUHAMMAD FARKHAN, S.Sos.,MAP.

ANDANG SUPRPTO, S.IP.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KETUA TIM KERJA PERENCANAAN SEKRETARIAT DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	4
2	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	1
3	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	1
4	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	2
5	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	2
6	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	17

Kegiatan		Anggaran		Keterangan
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.	45,380,000	DAU
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp.	2,305,000	DAU
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp.	2,225,000	DAU
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp.	1,925,000	DAU
5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp.	2,475,200	DAU
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp.	5,975,000	DAU

Wonosari, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,



MUHAMMAD FARKHAN, S.Sos., MAP

Pihak Kesatu,



ANDANG SUPRAPTO, S.I.P.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KHOIRU RAHMAT WIDIYANTO, SE.,MM.

Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Drs. SUJARWO, M.Si.

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 6 Januari 2025

Pihak Kesatu.



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Terlaksananya Peningkatan Kerjasama Desa	persentase perjanjian kerjasama desa yang diimplementasikan	persen	100
1.1	Terfasilitasinya Kerja sama antar Desa	Jumlah Fasilitasi Kerja sama antar Desa	dokumen	18
2	Terselenggaranya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan Dalam Pembangunan	persen	95
2.1	Terselenggaranya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	kegiatan	4
3	Tersusunnya Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Kalurahan Yang Menetapkan APBKai Tepat Waktu	persen	100
3.1	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang terlaksana	kegiatan	14

Program	Anggaran		Keterangan
1 Program Peningkatan Kerjasama Desa	Rp	8,730,000	DAU
1.1 Kegiatan Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Rp	8,730,000	DAU
2 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp	538,830,000	DAU
2.1 Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp	538,830,000	DAU

Program		Anggaran	Keterangan
3 Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp	223,745,000	DAU
3.1 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Rp	223,745,000	DAU



Wonosari, 6 Januari 2025

Pihak Kesatu,

KHOIRU RAHMAT WIDIYANTO, SE., MM.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦁꦏꦶꦢꦸꦭ
ꦢꦶꦤꦱꦧꦺꦩꦼꦂꦢꦺꦴꦪꦩꦱꦶꦫꦫꦏꦠꦺꦤ꧀ꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀,
ꦥꦺꦁꦒꦺꦤꦠꦺꦤ꧀ꦥꦺꦢꦸꦢꦏꦺꦭꦸꦂꦒꦺꦴꦤꦒꦺꦴꦭꦏꦺꦤꦼꦭꦏꦸꦭꦏꦺꦭꦸꦂꦒꦺꦴꦤꦒꦺꦴꦭꦏꦺꦤꦼꦭꦏꦸꦭ

Alamat: Jln. Taman Bhakti No. 1B Wonosari, Gunungkidul. Kode Pos 55813. Telp (0274) 391411
posel: pemberdayaan@gunungkidulkab.go.id Laman: pemberdayaan.gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BENI ADAM SON HASANI, SE.

Jabatan : Ketua Tim Kerja Usaha Perekonomian Masyarakat Kalurahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : KHOIRU RAHMAT WIDIYANTO, SE.,MM.

Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

KHOIRU RAHMAT WIDIYANTO, SE.,MM.

BENI ADAM SON HASANI, SE.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KETUA TIM KERJA USAHA PEREKONOMIAN MASYARAKAT KALURAHAN BIDANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Terfasilitasinya Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	dokumen	18
2	Terselenggaranya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	dokumen	2
3	Terfasilitasinya Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	dokumen	1
4	Terfasilitasinya Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	laporan	1

Kegiatan	Anggaran		Keterangan
1 Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Rp.	8,730,000	DAU
2 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Rp.	35,750,000	DAU
3 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Rp.	39,495,000	DAU
4 Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Rp.	14,710,000	DAU

Wonosari, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,



KHOIRU RAHMAT WIDIYANTO, SE., MM.

Pihak Kesatu,



BENI ADAM SON HASANI, SE.

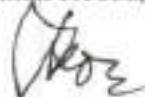
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KETUA TIM KERJA KELEMBAGAAN DAN PARTISIPASI BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Terfasilitasinya Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	dokumen	18
2	Terfasilitasinya Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	dokumen	2
3	Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	lembaga	80
4	Terfasilitasinya Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	dokumen	3
5	Terfasilitasinya Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	dokumen	4

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Fasilitas Penyusunan Profil Desa	7,260,000	DAU
2 Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	180,735,000	DAU
3 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	75,990,000	DAU
4 Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	278,880,000	DAU
5 Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	129,755,000	DAU

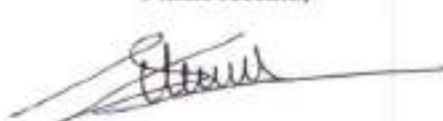
Wonosari, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,



KHOIRU RAHMAT WIDIYANTO, SE., MM.

Pihak Kesatu,



SUHUD DHARMAWAN, S.Tr.IP.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG BINA ADMINISTRASI DAN APARATUR PEMERINTAHAN
KALURAHAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Tersusunnya Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Kalurahan Yang Menetapkan APBKai Tepat Waktu	persen	100
1.1	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang terlaksana	kegiatan	14
2	Terselenggaranya Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase kalurahan yang sudah melaksanakan urusan keistimewaan	persen	90
2.1	Terselenggaranya Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Jumlah Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	lembaga	144

Program	Anggaran		Keterangan
1 Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp.	3,285,136,600	DAU
1.1 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Rp.	3,285,136,600	DAU
2 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	Rp.	246,530,000	DAIS
2.1 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Rp.	246,530,000	DAIS



Pihak Kedua,

Drs. SUJARWO, M.Si.

Wonosari, 6 Januari 2025

Pihak Kesatu,

KRISWANTORO, S.STP.,MM.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KETUA TIM KERJA BINA APARATUR PEMERINTAHAN KALURAHAN BIDANG BINA
ADMINISTRASI DAN APARATUR PEMERINTAHAN KALURAHAN DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Terselenggaranya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	orang	90
2	Terselenggaranya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	laporan	1
3	Terfasilitasinya Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	laporan	13
4	Terselenggaranya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	orang	144
5	Terselenggaranya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	dokumen	2

	Kegiatan	Anggaran		Keterangan
1.	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Rp.	34,415,000	DAU
2.	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Rp.	5,000,000	DAU
3.	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Rp.	2,993,565,600	DAU
4.	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Rp.	26,716,000	DAU
5.	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Rp.	246,530,000	DAIS

Pihak Kedua,

KRISWANTORO, S.STP.,MM.

Wonosari, 6 Januari 2025
Pihak Kesatu,

FAJAR NUGROHO, S.IP.,MAP.



အိမ်ထောင်ရေးနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးများကို အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိရန် အားပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။

Alamat: Jln. Taman Bhakti No. 1B Wonosari, Gunungkidul. Kode Pos 55813. Telp (0274) 391411
 posel: pemberdayaan@gunungkidulkab.go.id Laman: pemberdayaan.gunungkidulkab.go.id

DWI HARYANI

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KETUA TIM KERJA BINA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KALURAHAN BIDANG BINA
ADMINISTRASI DAN APARATUR PEMERINTAHAN KALURAHAN DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	dokumen	1
2	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	dokumen	1
3	Terlaksananya Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	dokumen	1
4	Terlaksananya Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	laporan	144

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 35,204,900	
2 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Rp. 6,000,000	
3 Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Rp. 1,500,000	
4 Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Rp. 2,000,100	

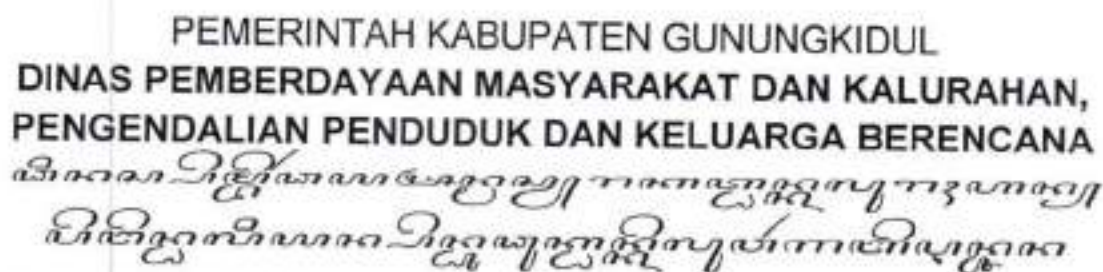
Wonorejo, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,


KRISWANTORO, S.STP.,MM.

Pihak Kesatu,


DWI HARYANI



Alamat: Jln. Taman Bhakti No. 1B Wonosari, Gunungkidul. Kode Pos 55813. Telp (0274) 391411
 posel: pemberdayaan@gunungkidulkab.go.id Laman: pemberdayaan.gunungkidulkab.go.id

Pihak Kedua,



Dis. SUJARWO, M.S

WAZIROH, S.I.P., M.I.P.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG BINA PERENCANAAN, KEUANGAN, DAN KEKAYAAN KALURAHAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Tersusunnya Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Kalurahan Yang Menetapkan APBKal Tepat Waktu	persen	100
1.1	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang terlaksana	kegiatan	14

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 117,215,000	DAU
1.1 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 117,215,000	DAU

Wonosari, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,

Drs. SUJARWO, M.Si.

Pihak Kesatu,

WAZIROH, S.IP., M.I.P.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KETUA TIM KERJA BINA PERENCANAAN KALURAHAN BIDANG BINA PERENCANAAN,
KEUANGAN, DAN KEKAYAAN KALURAHAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Terfasilitasinya Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	dokumen	177

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Rp. 18,210,000	DAU

Pihak Kedua,

WAZIROH, S.IP., M.I.P.

Wonosari, ...6 Januari... 2025
Pihak Kesatu,

TRI WIDODO, S.IP.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TRI WIDODO, S.IP.

Jabatan : Plt. Ketua Tim Kerja Bina Keuangan dan Kekayaan Kalurahan
Bidang Bina Perencanaan, Keuangan, dan Kekayaan Kalurahan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : WAZIROH, S.IP.,M.I.P.

Jabatan : Kepala Bidang Bina Perencanaan, Keuangan, dan Kekayaan
Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,



Pinak Kesatu,

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KETUA TIM KERJA BINA KEUANGAN DAN KEKAYAAN KALURAHAN BIDANG BINA
PERENCANAAN, KEUANGAN, DAN KEKAYAAN KALURAHAN DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Terfasilitasinya Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	dokumen	721
2	Terfasilitasinya Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	dokumen	289

Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Rp. 34,780,000	DAU
2.	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Rp. 64,225,000	DAU

Wonosari, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,

WAZIROH, S.IP., M.I.P.

Pihak Kesatu,

TRI WIDODO, S.IP.



Alamat: Jln. Taman Bhakti No. 1B Wonosari, Gunungkidul. Kode Pos 55813. Telp (0274) 391411
 posel: pemberdayaan@gunungkidulkab.go.id Laman: pemberdayaan.gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOHAMAD AMIRUDIN, S.Sos.

Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Drs. SUJARWO, M.Si.

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 6 Januari 2025
Pihak Kesatu.

Partik Kedua,



Drs. SUJARWO, M.Si.

MOHAMAD AMIRUDIN, S.Sos.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Tercapainya Pengendalian Penduduk	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) Seluruh Wanita Usia 25 - 49 Tahun	tahun	23
1.1	Terselenggaranya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	satuan pendidikan	10
1.2	Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	kegiatan	10
2	Terselenggaranya Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Kebutuhan KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	persen	8,15
2.1	Terlaksananya Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	laporan	18
2.2	Terpenuhinya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	orang	1573
2.3	Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten yang terlaksana	kegiatan	4
2.4	Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	kampung	38
3	Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Kelompok Kegiatan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga Yang Aktif	persen	80
3.1	Terlaksananya Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	kelompok	1021
3.2	Terselenggaranya Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	kegiatan	2

Program
1 Program Pengendalian Penduduk

Anggaran
Rp 449,027,500

Keterangan

Program	Anggaran	Keterangan
1.1 Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Rp 1,200,000	
1.2 Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 447,827,500	
2 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp 5,115,329,300	
2.1 Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Rp 1,645,310,000	
2.2 Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Rp 1,167,000,000	
2.3 Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1,893,019,300	
2.4 Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Rp 410,000,000	
3 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp 2,555,970,000	
3.1 Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Rp 206,370,000	
3.2 Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Rp 2,349,600,000	



Wonosari, 6 Januari 2025

Pihak Kesatu,

MOHAMAD AMIRUDIN, S.Sos.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ACHMAD AFANDI, SH.,MM.

Jabatan : Ketua Tim Kerja Keluarga Berencana Bidang Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : MOHAMAD AMIRUDIN. S.Sos.

Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

MOHAMAD AMIRUDIN, S.Sos.

Wonosari, 6 Januari 2025

Pihak Kesatu,

ACHMAD AFANDI, SH.,MM.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KETUA TIM KERJA KELUARGA BERENCANA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Terlaksananya Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	laporan	12
2	Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	laporan	10
3	Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	dokumen	1
4	Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	dokumen	4
5	Terlaksananya Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	organisasi	1
6	Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	orang	1579
7	Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	laporan	12
8	Terlaksananya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	orang	3575
9	Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	laporan	12
10	Terpenuhiya Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	laporan	1
11	Terfasilitasinya Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	unit	144

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
12	Terselenggaranya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	kampung	144
13	Terlaksananya Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	laporan/ dokumen	8
14	Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	unit	10
15	Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	laporan	10
16	Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	laporan	10

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Rp 975,310,000	
2 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Rp 369,180,000	
3 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Rp 100,000,000	
4 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Rp 10,000,000	
5 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Rp 190,820,000	
6 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Rp 1,167,000,000	
7 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Rp 78,595,000	
8 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Rp 1,745,425,000	
9 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Rp 38,492,000	
10 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Rp 30,507,300	
11 Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Rp 1,200,000	
12 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Rp 408,800,000	

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
13 Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Rp 76,370,000	
14 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Rp 130,000,000	
15 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Rp 1,068,000,000	
16 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Rp 1,281,600,000	

Wonosari, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,



MOHAMAD AMIRUDIN, S.Sos.

Pihak Kesatu,



ACHMAD AFANDI, SH.,MM.



Alamat: Jln. Taman Bhakti No. 1B Wonosari, Gunungkidul. Kode Pos 55813. Telp (0274) 391411
 posel: pemberdayaan@gunungkidulkab.go.id Laman: pemberdayaan.gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ACHMAD AFANDI, SH.,MM.

Jabatan : Plt. Ketua Tim Kerja Pengendalian Penduduk Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : MOHAMAD AMIRUDIN, S.Sos.

Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

MOHAMAD AMIRUDIN, S.Sos.

Wonosari, 6 Januari 2025

Pihak Kesatu.

ACHMAD AFANDI, SH.,MM.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KETUA TIM KERJA PENGENDALIAN PENDUDUK BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Terlaksananya Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	satuan pendidikan	10
2	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	laporan	1
3	Tersedianya Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	dokumen	1
4	Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	laporan	1
5	Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	dokumen	12
6	Tersusunnya Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	dokumen	1

Sub Kegiatan	Anggaran		Keterangan
1 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Rp	1,200,000	
2 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Rp	60,300,000	
3 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Rp	10,000,000	
4 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Rp	212,100,000	
5 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Rp	123,120,000	
6 Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Rp	42,307,500	

Wonosari, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,


MOHAMAD AMIRUDIN, S.Sos.


ACHMAD AFANDI, SH.,MM.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

ꦢꦶꦤꦱ꧀ꦧꦼꦩꦼꦂꦢꦂꦪꦤ꧀ꦩꦱꦶꦫꦫꦏꦠꦤ꧀ꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀
ꦥꦺꦁꦁꦺꦤꦠꦭꦶꦁꦥꦺꦤꦠꦸꦏꦤ꧀ꦏꦺꦭꦸꦂꦲꦤ꧀ꦧꦺꦂꦺꦤꦕꦤ

Alamat: Jln. Taman Bhakti No. 1B Wonosari, Gunungkidul. Kode Pos 55813 Telp (0274) 391411
posel: pemberdayaan@gunungkidulkab.go.id Laman: pemberdayaan.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. SUJARWO, M.Si.

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu.

Nama : ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH, S.E., M.P.

Jabatan : Bupati Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 4 September 2025

Pihak Kedua,

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

Pihak Kesatu,

Drs. SUJARWO, M.Si.

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kalurahan yang baik	Persentase kalurahan yang melaporkan LPPKal tepat waktu tahun 2026	Persen	100
		Persentase desa mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2026	Persen	87,5
2.	Terwujudnya pengendalian angka kelahiran	Total Fertility Rate (TFR)	nilai	1,91

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Akuntabilitas pemerintahan kalurahan dan pemberdayaan masyarakat meningkat	Persentase kalurahan yang melaporkan LPPKal tepat waktu	persen	95
		Persentase desa mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM)	persen	87,5
2.	Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah meningkat	Nilai AKIP PD	nilai	83,5
3.	PUS yang menjadi peserta KB aktif meningkat	Persentase pemakaian alat kontrasepsi modern	persen	78,16

Program		Anggaran Setelah Perubahan	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp3.161.603.153	APBD
2.	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Rp7.790.000	APBD
3.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp3.669.128.300	APBD
4.	Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp535.310.000	APBD
5.	Program Pengendalian Penduduk	Rp434.327.500	APBD DAK NonFisik
6.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp5.115.529.300	DAK NonFisik APBD
7.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp2.555.970.000	DAK NonFisik
8.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Rp173.349.600	DAIS

Pinak Kedua,



ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

Wonosari, 4 September 2025

Pinak Kesatu,



Drs. SUJARWO, M.Si.

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Tercapainya pemenuhan penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	persen	100
1.1	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	indeks	4.433
1.2	Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	laporan	14
1.3	Tersusunnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	dokumen	6
1.4	Tersusunnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi umum terlayani	kegiatan	10
1.5	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	unit	17
1.6	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	kegiatan	6
1.7	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	unit	438

Program	Anggaran Setelah Perubahan	Keterangan
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 3,161,603,153	DAU
1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 51,638,200	DAU
1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 2,230,731,708	DAU
1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 32,936,200	DAU
1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 226,277,800	DAU
1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 79,736,000	DAU
1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 188,549,125	DAU
1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 351,734,120	DAU

Wonosari, 4 September 2025

Pihak Kedua,

Drs. SUTARWO, M.Si.

Pihak Kesatu,

MUHAMMAD FARKHAN, S.Sos., MAP.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

බාහිර සමාජ සංවර්ධන කළමනාකරණ සහ
විප්ලවවාදී ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලන බලකා

Alamat: Jln. Taman Bhakti No. 1B Wonosari, Gunungkidul. Kode Pos 55813 Telp (0274) 391411
posel: pemberdayaan@gunungkidulkab.go.id Laman: pemberdayaan.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUHARTI, S.Sos.

Jabatan : Kepala Subbagian Umum Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu.

Nama : MUHAMMAD FARKHAN, S.Sos.,MAP.

Jabatan : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 4 September 2025

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

MUHAMMAD FARKHAN, S.Sos.,MAP.

SUHARTI, S.Sos.

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUB BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokumen	6
2	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	12
3	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	17
4	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	12
5	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	12
6	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	288
7	Terfasilitasinya Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	laporan	12
8	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	20
9	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	4
10	Terlaksananya Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	11
11	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	4
12	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	4
13	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	12
14	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	48
15	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	16
16	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	274
17	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	35
18	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	27
19	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1
20	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	15
21	Terselenggaranya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	4

Sub Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Keterangan
1 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawain	Rp. 32,936,200	DAU
2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 9,312,800	DAU
3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 75,275,000	DAU
4 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 5,720,000	DAU
5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 15,044,000	DAU
6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 1,200,000	DAU
7 Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp. 4,200,000	DAU
8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 83,277,000	DAU
9 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp. 32,249,000	DAU
10 Pengadaan Mebel	Rp. 14,536,000	DAU
11 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 35,200,000	DAU
12 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 30,000,000	DAU
13 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 3,000,000	DAU
14 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 110,399,125	DAU
15 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 75,150,000	DAU
16 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 216,100,000	DAU
17 Pemeliharaan Mebel	Rp. 2,200,000	DAU
18 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 11,150,000	DAU
19 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 117,784,120	DAU
20 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 4,500,000	DAU
21 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 3,753,000	DAU

Wonosari, 4 September 2025

Pihak Kedua,



MUHAMMAD FARKHAN, S.Sos., MAP.

Pihak Kesatu,



SUHARTI, S.Sos.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

ꦢꦶꦤꦱ꧀ꦧꦼꦩꦼꦂꦢꦂꦪꦤ꧀ꦩꦱꦶꦫꦫꦏꦤ꧀ꦢꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦠꦤꦥꦺꦁꦁꦢꦺꦭꦶꦁꦥꦺꦢꦸꦢꦏꦺꦭꦸꦂꦒꦤꦼꦫꦁꦧꦼꦂꦺꦤꦕꦤꦏ

Alamat: Jln. Taman Bhakti No. 1B Wonosari, Gunungkidul. Kode Pos 55813 Telp (0274) 391411
posel: pemberdayaan@gunungkidulkab.go.id Laman: pemberdayaan.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BENEDIKTUS YULIANTORO, SST.

Jabatan : Kepala Subbagian Keuangan Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu.

Nama : MUHAMMAD FARKHAN, S.Sos.,MAP.

Jabatan : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 4 September 2025

Pihak Kedua,

MUHAMMAD FARKHAN, S.Sos.,MAP.

Pihak Kesatu,

BENEDIKTUS YULIANTORO, SST.

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN SEKRETARIAT DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	414
2	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1
3	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	13

Sub Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Keterangan
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 2,196,896,708	DAU
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 2,090,000	DAU
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp. 31,745,000	DAU

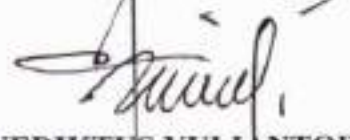
Wonosari, 4 September 2025

Pihak Kedua,



MUHAMMAD FARKHAN, S.Sos., MAP.

Pihak Kesatu,



BENEDIKTUS YULIANTORO, SST.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

ꦢꦶꦤꦱ꧀ꦥꦼꦩꦧꦺꦝꦫꦪꦤ꧀ꦩꦱꦶꦫꦫꦏꦤ꧀ꦢꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦠꦤ꧀ꦥꦺꦁꦢꦺꦤꦭꦶꦁꦥꦺꦢꦸꦢꦏꦺꦴꦭꦁꦧꦺꦴꦫꦤꦏꦺꦴꦭꦁꦧꦺꦴꦫꦤꦏꦺꦴꦭꦁꦧꦺꦴꦫꦤ

Alamat: Jln. Taman Bhakti No. 1B Wonosari, Gunungkidul. Kode Pos 55813 Telp (0274) 391411
posel: pemberdayaan@gunungkidulkab.go.id Laman: pemberdayaan.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDANG SUPRAPTO, S.IP.

Jabatan : Ketua Tim Kerja Perencanaan Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu.

Nama : MUHAMMAD FARKHAN, S.Sos.,MAP.

Jabatan : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 4 September 2025

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

MUHAMMAD FARKHAN, S.Sos.,MAP.

ANDANG SUPRAPTO, S.IP.

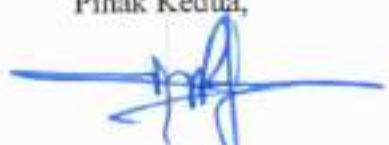
LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KETUA TIM KERJA PERENCANAAN SEKRETARIAT DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	4
2	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	1
3	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	1
4	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	2
5	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	2
6	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	17

Sub Kegiatan		Anggaran Setelah Perubahan	Keterangan
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 32,980,000	DAU
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp. 2,305,000	DAU
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp. 2,225,000	DAU
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp. 1,925,000	DAU
5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp. 2,475,200	DAU
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 5,975,000	DAU

Wonosari, 4 September 2025

Pihak Kedua,



MUHAMMAD FARKHAN, S.Sos., MAP.

Pihak Kesatu,



ANDANG SUPRPTO, S.IP.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

ꦢꦶꦤꦱ꧀ꦧꦼꦩꦼꦂꦢꦿꦪꦩꦱꦶꦫꦏꦤ꧀ꦢꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦢꦶꦁ
ꦥꦺꦁꦁꦢꦭꦶꦁꦥꦺꦢꦸꦢꦏꦺꦭꦸꦂꦒꦤꦼꦭꦏꦸꦁꦧꦺꦫꦺꦤꦕꦤ

Alamat: Jln. Taman Bhakti No. 1B Wonosari, Gunungkidul. Kode Pos 55813 Telp (0274) 391411
posel: pemberdayaan@gunungkidulkab.go.id Laman: pemberdayaan.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KHOIRU RAHMAT WIDIYANTO, SE.,MM.

Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu.

Nama : Drs. SUJARWO, M.Si.

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 4 September 2025

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,



Drs. SUJARWO, M.Si.

KHOIRU RAHMAT WIDIYANTO, SE.,MM.

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Terlaksananya Peningkatan Kerjasama Desa	persentase perjanjian kerjasama desa yang diimplementasikan	persen	100
1.1	Terfasilitasinya Kerja sama antar Desa	Jumlah Fasilitasi Kerja sama antar Desa	dokumen	18
2	Terselenggaranya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan Dalam Pembangunan	persen	95
2.1	Terselenggaranya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	kegiatan	4
3	Tersusunnya Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Kalurahan Yang Menetapkan APBKal Tepat Waktu	persen	100
3.1	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang terlaksana	kegiatan	14

Program	Anggaran Setelah Perubahan		Keterangan
1 Program Peningkatan Kerjasama Desa	Rp	7,790,000	DAU
1.1 Kegiatan Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Rp	7,790,000	DAU
2 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp	535,310,000	DAU
2.1 Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp	535,310,000	DAU

Program	Anggaran Setelah Perubahan		Keterangan
3 Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp	212,185,100	DAU
3.1 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Rp	212,185,100	DAU



Wonosari, 4 September 2025

Pihak Kesatu,

KHOIRU RAHMAT WIDIYANTO, SE., MM.

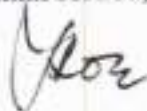
LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KETUA TIM KERJA USAHA PEREKONOMIAN MASYARAKAT KALURAHAN BIDANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Terfasilitasinya Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	dokumen	18
2	Terselenggaranya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	dokumen	2
3	Terfasilitasinya Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	dokumen	1
4	Terfasilitasinya Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	laporan	1

Sub Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Keterangan
1 Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Rp. 7,790,000	DAU
2 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Rp. 22,930,100	DAU
3 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Rp. 37,495,000	DAU
4 Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Rp. 11,600,000	DAU

Wonosari, 4 September 2025

Pihak Kedua,



KHOIRU RAHMAT WIDIYANTO, SE., MM.

Pihak Kesatu,



BENI ADAM SON HASANI, SE.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

ꦢꦶꦤꦱ꧀ꦧꦺꦫꦢꦪꦩꦱꦶꦫꦏꦏꦁꦏꦭꦸꦫꦏꦏꦁ
ꦥꦺꦁꦏꦺꦢꦭꦶꦁꦥꦺꦢꦸꦢꦏꦏꦭꦸꦫꦏꦏꦁꦧꦺꦫꦺꦤꦏꦏꦭꦸꦫꦏꦏꦁ

Alamat: Jln. Taman Bhakti No. 1B Wonosari, Gunungkidul. Kode Pos 55813 Telp (0274) 391411
posek: pemberdayaan@gunungkidulkab.go.id Laman: pemberdayaan.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUHUD DHARMAWAN, S.Tr.IP.

Jabatan : Ketua Tim Kerja Kelembagaan dan Partisipasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu.

Nama : KHOIRU RAHMAT WIDIYANTO, SE.,MM.

Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

KHOIRU RAHMAT WIDIYANTO, SE.,MM.

Wonosari, 4 September 2025

Pihak Kesatu,

SUHUD DHARMAWAN, S.Tr.IP.

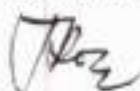
LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KETUA TIM KERJA KELEMBAGAAN DAN PARTISIPASI BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Terfasilitasinya Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	dokumen	18
2	Terfasilitasinya Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	dokumen	2
3	Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	lembaga	40
4	Terfasilitasinya Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	dokumen	3
5	Terfasilitasinya Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	dokumen	4

Sub Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan		Keterangan
1 Fasilitas Penyusunan Profil Desa	Rp	7,260,000	DAU
2 Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Rp	181,995,000	DAU
3 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Rp	81,670,000	DAU
4 Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Rp	274,790,000	DAU
5 Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Rp	129,755,000	DAU

Wonosari, 4 September 2025

Pihak Kedua,



KHOIRU RAHMAT WIDIYANTO, SE., MM.

Pihak Kesatu,



SUHUD DHARMAWAN, S.Tr.IP.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

ꦢꦶꦤꦱ꧀ꦧꦼꦩꦼꦂꦢꦪꦫꦺꦴꦩꦩꦠꦏꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦁꦏꦼꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦏꦼꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦥꦺꦁꦁꦼꦢꦏꦼꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦧꦼꦂꦺꦤꦕꦏꦁ

Alamat: Jln. Taman Bhakti No. 1B Wonosari, Gunungkidul. Kode Pos 55813 Telp (0274) 391411
posel: pemberdayaan@gunungkidulkab.go.id Laman: pemberdayaan.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KRISWANTORO, S.STP.,MM.
Jabatan : Kepala Bidang Bina Administrasi dan Aparatur Pemerintahan Kalurahan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu.

Nama : Drs. SUJARWO, M.Si.
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

Drs. SUJARWO, M.Si.

Wonosari, 4 September 2025

Pihak Kesatu,

KRISWANTORO, S.STP.,MM.

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG BINA ADMINISTRASI DAN APARATUR PEMERINTAHAN
KALURAHAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Tersusunnya Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Kalurahan Yang Menetapkan APBKal Tepat Waktu	persen	100
1.1	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang terlaksana	kegiatan	14
2	Terselenggaranya Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase kalurahan yang sudah melaksanakan urusan keistimewaan	persen	90
2.1	Terselenggaranya Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Jumlah Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	lembaga	144

Program	Anggaran Setelah Perubahan		Keterangan
1 Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp.	3,335,073,200	DAU
1.1 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Rp.	3,335,073,200	DAU
2 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	Rp.	173,349,600	DAIS
2.1 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Rp.	173,349,600	DAIS

Wonosari, 4 September 2025

Pihak Kedua,

Drs. SUJARWO, M.Si.

Pihak Kesatu,

KRISWANTORO, S.STP.,MM.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

බාගවන ප්‍රජා සාධක සංවර්ධන කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුව
විජ්‍යාපාලන සහ ප්‍රජා සංවර්ධන කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුව

Alamat: Jln. Taman Bhakti No. 1B Wonosari, Gunungkidul. Kode Pos 55813 Telp (0274) 391411
posel: pemberdayaan@gunungkidulkab.go.id Laman: pemberdayaan.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DWI HARYANI

Jabatan : Ketua Tim Tim Kerja Bina Administrasi Pemerintahan Kalurahan Bidang
Bina Administrasi dan Aparatur Pemerintahan Kalurahan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu.

Nama : KRISWANTORO, S.STP.,MM.

Jabatan : Kepala Bidang Bina Administrasi dan Aparatur Pemerintahan Kalurahan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 4 September 2025

Pihak Kedua,

KRISWANTORO, S.STP.,MM.

Pihak Kesatu,

DWI HARYANI

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KETUA TIM KERJA BINA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KALURAHAN BIDANG BINA
ADMINISTRASI DAN APARATUR PEMERINTAHAN KALURAHAN DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	dokumen	1
2	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	dokumen	1
3	Terlaksananya Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	dokumen	1
4	Terlaksananya Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	laporan	144

Sub Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Keterangan
1 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 35,404,900	
2 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Rp. 6,000,000	
3 Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Rp. 1,500,000	
4 Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Rp. 2,000,100	

Wonosari, 4 September 2025

Pihak Kedua,

KRISWANTORO, S.STP.,MM.

Pihak Kesatu,

DWI HARYANI



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

බාහිර සමාජ සංවර්ධන කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුව
විප්ලවනික සමාජ සංවර්ධන කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුව

Alamat: Jln. Taman Bhakti No. 1B Wonosari, Gunungkidul. Kode Pos 55813 Telp (0274) 391411
posel: pemberdayaan@gunungkidulkab.go.id Laman: pemberdayaan.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FAJAR NUGROHO, S.IP.,M.A.P.

Jabatan : Ketua Tim Kerja Bina Aparatur Pemerintahan Kalurahan Bidang Bina Administrasi dan Aparatur Pemerintahan Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu.

Nama : KRISWANTORO, S.STP.,MM.

Jabatan : Kepala Bidang Bina Administrasi dan Aparatur Pemerintahan Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

KRISWANTORO, S.STP.,MM.

Wonosari, 4 September 2025
Pihak Kesatu,

FAJAR NUGROHO, S.IP.,M.A.P.

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KETUA TIM KERJA BINA APARATUR PEMERINTAHAN KALURAHAN BIDANG BINA
ADMINISTRASI DAN APARATUR PEMERINTAHAN KALURAHAN DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Terselenggaranya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	orang	90
2	Terselenggaranya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	laporan	1
3	Terfasilitasinya Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	laporan	14
4	Terselenggaranya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	orang	144
5	Terselenggaranya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	dokumen	2

Sub Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Keterangan
1. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Rp. 34,615,000	DAU
2. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Rp. 3,400,000	DAU
3. Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Rp. 3,238,237,200	DAU
4. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Rp. 13,916,000	DAU
5. Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Rp. 173,349,600	DAIS

Wonosari, 4 September 2025

Pihak Kedua,


KRISWANTORO, S.STP.,MM.

Pihak Kesatu,

FAJAR NUGROHO, S.IP.,MAP.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

ꦢꦶꦤꦱ꧀ꦧꦼꦩꦼꦂꦢꦿꦪꦩꦱꦶꦫꦫꦏꦏꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦁꦏꦶꦢꦸꦭ
ꦥꦺꦁꦏꦺꦢꦭꦶꦁꦥꦺꦢꦸꦢꦏꦏꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Alamat: Jln. Taman Bhakti No. 1B Wonosari, Gunungkidul. Kode Pos 55813 Telp (0274) 391411
posel: pemberdayaan@gunungkidulkab.go.id Laman: pemberdayaan.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WAZIROH, S.IP.,M.IP.

Jabatan : Kepala Bidang Bina Perencanaan, Keuangan, dan Kekayaan Kalurahan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu.

Nama : Drs. SUJARWO, M.Si.

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 4 September 2025

Pihak Kesatu,



Drs. SUJARWO, M.Si.

WAZIROH, S.IP., M.IP.

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG BINA PERENCANAAN, KEUANGAN, DAN KEKAYAAN KALURAHAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Tersusunnya Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Kalurahan Yang Menetapkan APBKai Tepat Waktu	persen	100
1.1	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang terlaksana	kegiatan	14

Program	Anggaran Setelah Perubahan	Keterangan
1 Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 121,870,000	DAU
1.1 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 121,870,000	DAU

Wonosari, 4 September 2025

Pihak Kedua,

Drs. SUJARWO, M.Si.

Pihak Kesatu,

WAZIROH, S.I.P., M.I.P.

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KETUA TIM KERJA BINA PERENCANAAN KALURAHAN BIDANG BINA PERENCANAAN,
KEUANGAN, DAN KEKAYAAN KALURAHAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Terfasilitasinya Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	dokumen	291

Sub Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Keterangan
1. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Rp. 22,665,000	DAU

Pihak Kedua,


WAZIRAH, S.I.P., M.I.P.

Wonosari, 4 September 2025

Pihak Kesatu,


TRI WIDODO, S.I.P.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

ꦢꦶꦤꦱ꧀ꦥꦼꦩꦧꦺꦝꦫꦪꦩꦱꦶꦫꦫꦏꦤ꧀ꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦥꦺꦁꦁꦢꦺꦭꦶꦁꦥꦺꦤꦝꦸꦏꦏꦺꦭꦸꦂꦒꦤꦼꦫꦁꦧꦺꦫꦺꦤꦕꦤ

Alamat: Jln. Taman Bhakti No. 1B Wonosari, Gunungkidul. Kode Pos 55813 Telp (0274) 391411
posel: pemberdayaan@gunungkidulkab.go.id Laman: pemberdayaan.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BENI MOI, SE.

Jabatan : Ketua Tim Kerja Bina Keuangan dan Kekayaan Kalurahan Bidang Bina Perencanaan, Keuangan, dan Kekayaan Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu.

Nama : WAZIROH, S.IP.,M.IP.

Jabatan : Kepala Bidang Bina Perencanaan, Keuangan, dan Kekayaan Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 4 September 2025

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

WAZIROH, S.IP.,M.IP.

BENI MOI, SE.

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KETUA TIM KERJA BINA KEUANGAN DAN KEKAYAAN KALURAHAN BIDANG BINA
PERENCANAAN, KEUANGAN, DAN KEKAYAAN KALURAHAN DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Terfasilitasinya Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	dokumen	721
2	Terfasilitasinya Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	dokumen	289

Sub Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Keterangan
1. Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Rp. 34,780,000	DAU
2. Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	Rp. 64,425,000	DAU

Wonosari, 4 September 2025

Pihak Kedua,


WAZIROH, S.IP., M.I.P.

Pihak Kesatu,


BENI MOI, SE.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

ꦢꦶꦤꦱ꧀ꦥꦼꦩꦧꦺꦝꦫꦪꦩꦱꦶꦫꦫꦏꦤ꧀ꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦥꦺꦁꦁꦺꦝꦏꦭꦤ꧀ꦥꦺꦝꦸꦏꦤ꧀ꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦧꦺꦫꦺꦁꦁꦧꦺꦫꦺꦁꦤꦺ

Alamat: Jln. Taman Bhakti No. 1B Wonosari, Gunungkidul. Kode Pos 55813 Telp (0274) 391411
posel: pemberdayaan@gunungkidulkab.go.id Laman: pemberdayaan.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOHAMAD AMIRUDIN, S.Sos.

Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu.

Nama : Drs. SUJARWO, M.Si.

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 4 September 2025

Pihak Kesatu,

Pihak Kedua,



Drs. SUJARWO, M.Si.

MOHAMAD AMIRUDIN, S.Sos.

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Tercapainya Pengendalian Penduduk	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) Seluruh Wanita Usia 25 - 49 Tahun	tahun	23
1.1	Terselenggaranya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	satuan pendidikan	10
1.2	Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	kegiatan	10
2	Terselenggaranya Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Kebutuhan KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	persen	8,15
2.1	Terlaksananya Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	laporan	18
2.2	Terpenuhinya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	orang	1573
2.3	Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten yang terlaksana	kegiatan	4
2.4	Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	kampung	38
3	Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Kelompok Kegiatan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga Yang Aktif	persen	80
3.1	Terlaksananya Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	kelompok	1021
3.2	Terselenggaranya Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	kegiatan	2

Program
1 Program Pengendalian Penduduk

Anggaran Setelah Perubahan
Rp 434,327,500

Keterangan

Program	Anggaran Setelah Perubahan	Keterangan
1.1 Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Rp 1,200,000	
1.2 Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 433,127,500	
2 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp 5,115,529,300	
2.1 Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Rp 1,645,310,000	
2.2 Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Rp 1,167,000,000	
2.3 Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1,893,219,300	
2.4 Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Rp 410,000,000	
3 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp 2,555,970,000	
3.1 Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Rp 206,370,000	
3.2 Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Rp 2,349,600,000	

Wonosari, 4 September 2025

Pihak Kesatu,

MOHAMAD AMIRUDIN, S.Sos.



Pihak Kedua,

Drs. SUJARWO, M.Si.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

ꦢꦶꦤꦱꦧꦼꦩꦼꦂꦢꦪꦫꦤ꧀ꦩꦱꦶꦫꦫꦏꦤ꧀ꦢꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀
ꦥꦺꦁꦼꦢꦤꦭꦶꦁꦥꦺꦢꦸꦢꦏꦺꦭꦸꦂꦒꦤꦼꦫꦺꦤꦏꦺꦭꦸꦂꦒꦤꦼꦫꦺꦤꦏꦺꦭꦸꦂꦒ

Alamat: Jln. Taman Bhakti No. 1B Wonosari, Gunungkidul. Kode Pos 55813 Telp (0274) 391411
posel: pemberdayaan@gunungkidulkab.go.id Laman: pemberdayaan.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ACHMAD AFANDI, SH.,MM.

Jabatan : Plt. Ketua Tim Kerja Pengendalian Penduduk Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu.

Nama : MOHAMAD AMIRUDIN, S.Sos.

Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Wonosari, 4 September 2025

Pihak Kesatu,

MOHAMAD AMIRUDIN, S.Sos.

ACHMAD AFANDI, SH.,MM.

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KETUA TIM KERJA PENGENDALIAN PENDUDUK BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Terlaksananya Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	satuan pendidikan	10
2	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	laporan	1
3	Tersedianya Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	dokumen	1
4	Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	laporan	1
5	Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	dokumen	12
6	Tersusunnya Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	dokumen	1

Sub Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan		Keterangan
1 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Rp	1,200,000	
2 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Rp	60,300,000	
3 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Rp	10,000,000	
4 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Rp	212,100,000	
5 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Rp	123,120,000	
6 Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Rp	27,607,500	

Wonosari, 4 September 2025

Pihak Kedua,


MOHAMAD AMIRUDIN, S.Sos.

Pihak Kesatu,


ACHMAD AFANDI, SH.,MM.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

ꦢꦶꦤꦱ꧀ꦧꦼꦩꦼꦂꦢꦿꦪꦩꦱꦶꦫꦒꦏꦤ꧀ꦢꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦥꦺꦁꦏꦺꦤꦠꦺꦝꦏꦺꦭꦸꦂꦒꦏꦤ꧀ꦧꦼꦂꦺꦤꦠꦏꦺꦭꦸꦂꦒꦏꦤ꧀ꦧꦼꦂꦺꦤꦠ

Alamat: Jln. Taman Bhakti No. 1B Wonosari, Gunungkidul, Kode Pos 55813 Telp (0274) 391411
posel: pemberdayaan@gunungkidulkab.go.id Laman: pemberdayaan.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ACHMAD AFANDI, SH.,MM.

Jabatan : Ketua Tim Kerja Keluarga Berencana Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu.

Nama : MOHAMAD AMIRUDIN, S.Sos.

Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


MOHAMAD AMIRUDIN, S.Sos.

Wonosari, 4 September 2025

Pihak Kesatu,


ACHMAD AFANDI, SH.,MM.

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KETUA TIM KERJA KELUARGA BERENCANA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Terlaksananya Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	laporan	12
2	Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	laporan	10
3	Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	dokumen	1
4	Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	dokumen	4
5	Terlaksananya Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	organisasi	1
6	Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	orang	1579
7	Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	laporan	12
8	Terlaksananya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	orang	3575
9	Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	laporan	12
10	Terpenuhinya Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	laporan	1
11	Terfasilitasinya Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	unit	144

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
12	Terselenggaranya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	kampung	144
13	Terlaksananya Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	laporan/ dokumen	8
14	Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	unit	10
15	Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	laporan	10
16	Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	laporan	10

Sub Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Keterangan
1 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Rp 975,310,000	
2 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Rp 369,180,000	
3 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Rp 100,000,000	
4 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Rp 10,000,000	
5 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Rp 190,820,000	
6 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Rp 1,167,000,000	
7 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Rp 78,595,000	
8 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Rp 1,745,425,000	
9 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Rp 38,492,000	
10 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Rp 30,707,300	
11 Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Rp 1,200,000	
12 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Rp 408,800,000	

Sub Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Keterangan
13 Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Rp 76,370,000	
14 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Rp 130,000,000	
15 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Rp 1,068,000,000	
16 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Rp 1,281,600,000	

Wonosari, 4 September 2025

Pihak Kedua,


MOHAMAD AMIRUDIN, S.Sos.

Pihak Kesatu,


ACHMAD AFANDI, SH.,MM.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
INSPEKTORAT DAERAH

အကျဉ်းချုပ်အားဖြင့်

Jalan Taman Bhakti 2B WonosariGunungkidul 55812

Telepon (0274) 391539, Faksimile (0274) 391539

Posel : inspektorat@gunungkidulkab.go.id, Laman : inspektorat.gunungkidulkab.go.id

Wonosari, 19 Maret 2025

Nomor : 700.1.2.7/Er-LKJ/02
Sifat : Rahasia
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Internal pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMKP2KB) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024

Yth. Sekretaris Daerah
Kabupaten Gunungkidul
di
Wonosari

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Bupati Nomor 164/KPTS/2024 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Surat Perintah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 000.8.7.3/33/2025, serta Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 01/ITDA-Ev.LKj/III/2025 tanggal 5 Maret 2025, kami telah melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Internal pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMKP2KB) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 mulai tanggal 5 Maret sampai dengan 18 Maret 2025 dengan hasil sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Latar Belakang Evaluasi

Latar belakang dilakukannya evaluasi AKIP internal Perangkat Daerah adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Evaluasi AKIP internal ini diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

3. Tujuan Evaluasi

Tujuan dilaksanakannya evaluasi AKIP internal adalah:

- a. memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- b. menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
- e. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi AKIP internal mencakup antara lain:

- penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya; dan
- penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi AKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

5. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP internal adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan).

Penilaian dilakukan pada komponen dan sub-komponen evaluasi AKIP internal, setiap sub-komponen dinilai berdasarkan kriteria pemenuhan dokumen, kualitas dan pemanfaatan. Setiap sub-komponen akan dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, gambaran kriteria sesuai dengan gradasi nilai sebagai berikut:

- Penilaian Keberadaan

Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
AA	100	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir.
A	90	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 1 tahun terakhir.
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.
B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% -

Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
		100%).
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

b. Penilaian Kualitas dan Pemanfaatan

Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
AA	100	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.
A	90	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.
B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

Setiap sub-komponen kriteria yang telah diberikan nilai dalam pemenuhan kriteria harus dilengkapi dengan catatan berupa keterangan beserta bukti daftar dokumen yang mendukung dan relevan.

Nilai pada sub-komponen yang telah terisi akan terakumulasi sehingga diperoleh nilai total (hasil akhir) di setiap komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai >90–100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B (Nilai > 60 – 70)	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.

Predikat	Interpretasi
C (Nilai > 30 – 50)	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi AKIP.

6. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMKP2KB) Kabupaten Gunungkidul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Sedangkan tugas pokok dan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMKP2KB) Kabupaten Gunungkidul ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMKP2KB) Kabupaten Gunungkidul mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Kalurahan, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana.

7. Gambaran Umum Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat,

dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

8. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Laporan Hasil Monitoring Nomor 700.1.2.7/SKIP/43 tanggal 17 Juli 2024, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMKP2KB) Kabupaten Gunungkidul telah menindaklanjuti semua rekomendasi hasil evaluasi AKIP Tahun 2023

B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

Hasil evaluasi AKIP internal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMKP2KB) Kabupaten Gunungkidul menunjukkan bahwa nilai sebesar 83,97 dengan predikat A. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “memuaskan” yaitu terdapat gambaran bahwa Perangkat Daerah dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.

Rincian hasil evaluasi internal tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2023	2024
1. Perencanaan Kinerja	30,00	26,50	25,47
2. Pengukuran Kinerja	30,00	24,14	24,68
3. Pelaporan Kinerja	15,00	12,49	12,23
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	19,85	21,60
Nilai Hasil Evaluasi		82,99	83,97
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A	A

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMKP2KB) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Perangkat Daerah telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mencakup Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD), Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Dokumen Rencana Strategis (Renstra), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan, Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai dan Dokumen Rencana Aksi atas Kinerja.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja yaitu

Target yang ditetapkan dalam Perencanaan kinerja pada sasaran strategis belum menantang hal tersebut dapat dilihat dari realisasi tahun sebelumnya belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perencanaan dimana realisasi tahun sebelumnya untuk 2 (dua) indikator sasaran strategis melebihi target tahun 2024, dan rata-rata capaian target indikator kinerja atas sasaran strategis tahun 2024 sebesar 230,115% (sangat tinggi) melebihi target yang ditetapkan sebesar 57,16%.

2. Pengukuran Kinerja

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMKP2KB) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 telah melaksanakan pengukuran kinerja mencakup mekanisme pengukuran kinerja mulai dari pengumpulan data kinerja, keterlibatan pimpinan dalam mengukur capaian kinerja hingga pemanfaatannya. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja yaitu:

Data kinerja yang disajikan belum mewakili (representatif) kinerja (sasaran) atau kondisi yang akan diwujudkan, hal tersebut disebabkan target kinerja yang digunakan dalam mengukur kinerja menggunakan perjanjian kinerja awal(sebelum perubahan).

3. Pelaporan Kinerja

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMKP2KB) Kabupaten Gunungkidul telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2024 mencakup pemenuhan pelaporan kinerja, penyampaian, publikasi, penyajian informasi kinerja dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja antara lain sebagai yaitu:

Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan dan membandingkan realisasi kinerja dengan target tahunan, namun target kinerja yang telah diperjanjikan yang disajikan dalam laporan merupakan dokumen perjanjian kinerja (sebelum perubahan) sehingga terdapat perubahan target yang belum disajikan dalam laporan.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mencakup pemenuhan tindak lanjut hasil evaluasi internal dan pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan kinerja di masa yang akan datang.

C. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMKP2KB) Kabupaten Gunungkidul terdapat beberapa hal yang disarankan/direkomendasikan untuk perbaikan di masa yang akan datang dan meningkatkan efektivitas penerapan akuntabilitas kinerja, yaitu:

a. Perencanaan Kinerja

Melakukan reviu dan perbaikan perencanaan kinerja untuk memastikan rumusan target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja dapat dicapai (achieveable), menantang, dan realistis.

b. Pengukuran Kinerja

Memastikan keselarasan data kinerja antara lain nilai target kinerja pada perjanjian kinerja dengan perhitungan capaian kinerja yang tersaji dalam laporan.

c. Pelaporan Kinerja

Memastikan keselarasan data kinerja antara lain nilai target kinerja pada perjanjian kinerja dengan penyajian dalam laporan.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Tidak terdapat rekomendasi

D. PENUTUP

1. Dorongan terhadap implementasi AKIP yang lebih baik

Dalam rangka peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka Perangkat Daerah harus berkomitmen dan secara konsisten melakukan evaluasi untuk meningkatkan implementasi AKIP dalam mewujudkan target capaian kinerja yang telah direncanakan.

2. Apresiasi

Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMKP2KB) Kabupaten Gunungkidul atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan evaluasi.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMKP2KB) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024, mohon menjadikan periksa.

 Inspektur,
Saptoyo, S.Sos, M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 197103251991011001

Tembusan:

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan); dan
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMKP2KB) Kabupaten Gunungkidul.

Lampiran

Nomor : 700.1.2.7/191

Tanggal : 23 Mei 2025

**TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
TAHUN 2024**

NO	CATATAN	SARAN/ REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1.	PERENCANAAN KINERJA		
	Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja pada sasaran strategis belum menantang hal tersebut dapat dilihat dari realisasi tahun sebelumnya belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perencanaan dimana realisasi tahun sebelumnya untuk 2 (dua) indikator sasaran strategis melebihi target tahun 2024, dan rata-rata capaian target indikator kinerja atas sasaran strategis tahun 2024 sebesar 230,115% (sangat tinggi) melebihi target yang ditetapkan sebesar 57,16%.	Melakukan reviu dan perbaikan perencanaan kinerja untuk memastikan rumusan target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja dapat tercapai (achieveable), menantang, dan realistis	Telah kami tindaklanjuti dengan mencantumkan proyeksi target tujuan maupun sasaran pada dokumen Renja Perubahan 2025. Target tujuan dan sasaran Renstra 2025-2029 juga sudah disesuaikan
2.	PENGUKURAN KINERJA		
	Data kinerja yang disajikan belum mewakili (representative) kinerja (sasaran) atau kondisi yang akan diwujudkan, hal tersebut disebabkan target kinerja yang digunakan dalam mengukur kinerja menggunakan perjanjian kinerja awal (sebelum perubahan)	Memastikan keselarasan data kinerja antara lain nilai target kinerja pada perjanjian kinerja dengan perhitungan capaian kinerja yang tersaji dalam laporan	Telah kami tindaklanjuti dengan mencantumkan target tujuan dan sasaran sesuai dengan proyeksi target tujuan dan sasaran. Target tujuan dan sasaran Renstra 2025-2029 juga sudah disesuaikan
3.	PELAPORAN KINERJA		
	Laporan kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan dan membandingkan realisasi kinerja dengan target tahunan, namun target	Memastikan keselarasan data kinerja antara lain nilai target kinerja pada perjanjian kinerja dengan penyajian dalam laporan	Telah kami tindaklanjuti dengan mencantumkan target tujuan dan sasaran sesuai

NO	CATATAN	SARAN/ REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
	kinerja yang telah diperjanjikan yang disajikan dalam laporan merupakan dokumen perjanjian kinerja (sebelum perubahan) sehingga terdapat perubahan target yang belum disajikan dalam laporan.		dengan proyeksi target tujuan dan sasaran. Target tujuan dan sasaran Renstra 2025-2029 juga sudah disesuaikan
4.	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL		
	Tidak terdapat catatan	Tidak terdapat rekomendasi	NIHIL



Drs. SUJARWO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP.196604251991021001